



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana rencana kerja pemerintah daerah dapat berubah dalam hal ada ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Kabupaten Paser tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.

2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser .
4. Rencana Kerja Pemerintahn Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Paser untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD TAHUN 2023

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2023 dijadikan sebagai:

- a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Sistematika perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Evaluasi hasil triwulan II (Triwulan Dua) tahun 2023
 - BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
 - BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
 - BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
 - BAB VI Penutup
- (2) Rincian Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP.19680816 199803 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
Daftar Grafik	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I - 2
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 6
1.4 Sistematika Dokumen RKPD	I - 6
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2023	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 1
2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan RKPD	II - 56
2.3 Rekomendasi	II - 66
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III - 1
3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro	III - 1
3.1.2 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2023	III - 11
3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah	III - 12
3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah	III - 13
3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah	III - 18
3.2.3 Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III - 25
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	VI - 1
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023	IV- 1
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	
5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah	V - 1
BAB VI PENUTUP.....	VI -1

Daftar Tabel

	Hal
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Paser Triwulan II Tahun 2023	II - 2
Tabel 2.2 Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023	II - 45
Tabel 2.3 Konsistensi Program RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023	II - 48
Tabel 2.4 Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022	II - 50
Tabel 2.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023	II - 57
Tabel 3.1 Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser Tahun 2018-2022	III - 3
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2018-2022 .	III - 4
Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2018-2022 (Persen).....	III - 4
Tabel 3.4 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2018-2022	III - 5
Tabel 3.5 Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2018-2022 ...	III - 7
Tabel 3.6 Jumlah Nilai Investasi 2018-2022	III - 7
Tabel 3.7 Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser Tahun 2018-2022	III - 10
Tabel 3.8 Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser.....	III - 11
Tabel 3.9 Sasaran Ekonomi Makro Daerah.....	III - 11
Tabel 3.10 Realisasi dan Perubahan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023	III - 15
Tabel 3.11 Realisasi dan Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023	III - 19

Tabel 3.12 Proyeksi Mandatory Spending Kabupaten Paser.....	III - 22
Tabel 3.13 Realisasi dan Perubahan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023	III - 26
Tabel 4.1 Sasaran Ekonomi Makro Daerah.....	IV - 2
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023	IV - 2
Tabel 5.1 Pagu Perangkat Daerah Menurut Urusan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023	V - 1
Tabel 5.2 Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023.....	V - 5

Daftar Grafik

	Hal
Grafik 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2018-2022	III - 2
Grafik 3.2 PDRB Perkapita Kabupaten Paser	III - 6
Grafik 3.3 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2022.....	III - 8
Grafik 3.4 Penduduk Miskin di Kabupaten Paser (%)	III - 9
Grafik 3.5 Garis Kemiskinan Kabupaten Paser	III - 9

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASER NOMOR
53 TAHUN 2023 TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
PASER TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser 2021-2026 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang dan untuk merealisasikan pelaksanaan Visi dan Misi Kabupaten Paser dan memenuhi amanat sesuai dengan aturan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Paser berkewajiban untuk melaksanakan perencanaan pembangunan untuk setiap tahapan pembangunan. Secara umum Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai amanat Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 bahwa dalam pelaksanaan rencana pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Berdasarkan amanat peraturan tersebut maka jika dalam proses pelaksanaan rencana pembangunan terdapat perubahan-perubahan asumsi yang mempengaruhi capaian target kinerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan perubahan

rencana pembangunan. Hal ini dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa RKPD dapat dirubah apabila hasil evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Memperhatikan amanat peraturan tersebut berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sampai dengan semester 1 RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023, dipandang perlu melakukan dan menyusun Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023.

Dalam pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa perubahan RKPD yang diikuti dengan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pemerintah Kabupaten Paser dalam melaksanakan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 sampai dengan semester 1 pada tahun berjalan telah menemukan beberapa kondisi yang layak dijadikan dasar pertimbangan dalam melakukan perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 sebagai berikut;

1. Perkembangan keadaan yang dinamis sehingga berdampak terhadap perubahan anggaran serta target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. Penyelarasan dengan percepatan program prioritas pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2022 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 22 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pecapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang telah dicabut;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
32. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 04 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;

38. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi perkembangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan kondisi terkini;
2. Memberikan dasar hukum perubahan target, rencana program dan pagu kegiatan;
3. Sebagai Pedoman dalam melakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Paser dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA-APBD) Kabupaten Paser Tahun 2023 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023

1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab I. Pendahuluan

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2. Bab II. Evaluasi Hasil Triwulan II (Dua) Tahun 2023

Menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan Realisasi RPJMD serta Permasalahan Pembangunan Daerah

3. Bab III. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

4. Bab IV. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2023.

5. Bab V. Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah

Memuat rencana program dan kegiatan prioritas perangkat daerah (PD), dan sub kegiatan, indikator capaian masing-masing program dan kegiatan serta pagu indikatifnya.

6. Bab VI. Penutup

Memuat kesimpulan dari dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023.

BAB II

EVALUASI HASIL TRIWULAN II (DUA) TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pengendalian dan Evaluasi dimaksudkan untuk lebih memperjelas dan mempermudah arah serta pelaksanaan program-program pembangunan sehingga tepat sasaran dan mempermudah dalam melakukan pengawasan sehingga memperkecil kemungkinan penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan meliputi :

- a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah (RKPD).
- b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).
- c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

Evaluasi terhadap hasil Rencana Pembangunan Tahunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lingkup Kabupaten Paser. Hasil evaluasi ini selanjutnya menjadi umpan balik bagi perumusan kebijakan Bupati dalam mewujudkan :

- a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.
- b. Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD.
- c. Kesesuaian antara capaian pembangunan di Kabupaten Paser dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Adapun Kinerja RKPD Semester 1 Tahun 2023 atau Realisasi Kinerja Triwulan II yang dilaksanakan hingga sampai dengan periode 30 Juni 2023 sebagai berikut

Tabel 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Paser Triwulan II Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			5.936.099,698.053,00		815.171.951,685,02		1.282.632,863.482,00		489.766,945.578,00			1.304.938.897,263,02		8,25		
		1 1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			324.239,585.508,00		159.060.383,782,02		324.239,585.508,00	11,50		110,07		335.232.072,318,02				
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 01 001		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	%	0	72	%	36	%		50,00		50		69,44	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	%	236.622,977.128,00	80.706.643,700,00	100	%	50	%	50,00		50		50,00		
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1 01 002		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Putus Sekolah SD	1	%	0	1	%	0	%		-	0		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Angka Putus Sekolah SMP	2	%			2	%	0	%	-		0			-	
				APK PAUD	38	%	86.611,10	77.777,283,372,02	38	%	0	%	29.074,30		0			-	
				APK SD	107	%	8.380,00		107	%	0	%	4.147,00		0			-	
				APK SMP	96	%			96	%	0	%	-		0			-	
				APM SD	98	%			98	%	0	%	-		0			-	
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat				APM SMP	96	%			96	%	0	%	-		0			-	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase satuan Pendidikan (Jenjang PAUD, Dikdas dan kesetaraan) yang memiliki kurikulum mata pelajaran Muatan Lokal	100	%	40.500,000,00	1.296.000,00	100	%	25	%	25,00		25		3,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1 01 004		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	persentase satuan pendidikan yang memiliki pendidik sesuai standar	91	%	0,00		91	%	0	%	-		0		-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahunn Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12 = 11/6 x 100%	(13)	
				persentase satuan pendidikan yang memiliki tenaga kependidikan sesuai standar	55 %		%		55		0 %		-		0		-		
	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1 01 005	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta / Masyarakat yang mendapatkan Rekomendasi Perijinan pendidikan sesuai ketentuan	100 %	965.000.000,00	%	575.165.710,00	100 %	965.000.000,00	50 %	141.840.500,00	50,00	14,698497	50	717.006.210,00	50,00	74,30	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	1 01 006	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	persentase Satuan Pendidikan yang mengembangkan bahasa dan sastra dalam muatan lokal	100 %	0,00	%		100 %	0,00	0 %	0,00	-	0	0	0,00	-		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			166.238.290.913,00		85.623.529.588,00		166.238.290.913,00	72,38			435,39	400,00	256.293.782.931,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	75 %	113.220.412.153,00	0	29.078.260.835,00	70	113.220.412.153,00	81	72.995.584.503,00	108,00	64,472106	108	102.073.845.338,00	144,00	90,15	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 02 002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase pemenuhan layanan UKM dan UKP	100 %	37.612.440.7860,00	0	48.324.766.889,00	100	37.612.447.860,00	50	77.840.703.571,00	50,00	206,95463	50	126.165.470.460,00	50,00	335,44	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 02 003	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase peningkatan kapasitas SDM kesehatan	100 %	15.267.940.6000,00	0	7.919.798.600,00	100	15.267.946.000,00	81	19.809.089.269,00	81,00	129,74299	81	27.728.887.869,00	81,00	181,62	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 02 004	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN	Persentase obat, alkes & makanan minuman di peredaran yg memenuhi syarat	100 %	61.749.900,00	0	73.442.822,00	100	61.749.900,00	50	4.596.000,00	50,00	7,442927	50	78.038.822,00	50,00	126,38	Dinas Kesehatan

Penyusunan RKPD Kabupaten Bener Tahun 2023

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%)		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1 02 005	MINUMAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	90 %	75.735.00 0,00	227.260.442 ,00	90	75.735.000 ,00	99,9	20.280.00 0,00	111, 00	26,77758	111	247.540.442,00	123,3 3	326,85	Dinas Kesehatan	
		1 3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			123.351.6 22.880.00	331.419.994 ,435,00		123.351.62 2.880,00 5	27,4 5			1.467,32	428, 77	449.110.616,15 6,00				
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 03 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	13.618.90 4.175,00	3.717.942,5 54,00	72	13.618.904 ,175,00	72 %	6.792.372. 807,00	100, 00	49,874591	100	10.510.315.361, 00	138,8 9	77,17	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	1 03 002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	persentase kawasan sumber daya air yang dikelola dengan baik	30 %	76.459.80 0.000,00	11.124.867. 843,00	30	76.459.800 ,000,00	10 %	2.114.954. 066,00	33,3 3	2,7660994	33,3 333 3	13.239.821.909, 00	111,1 1	17,32	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Meningkatnya cakupan rumah tangga yang teraliri air bersih	1 03 003	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	persentase capaian akses air minum layak	81 %	11.039.25 0.130,00	40.891.588. 820,00	81	11.039.250 ,130,00	40 %	1.027.299. 468,00	49,3 8	9,3058809	49,3 827 2	41.918.888.288, 00	60,97	379,73	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	1 03 004	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	persentase bangunan dan infrastruktur persampahan yang dikelola dengan baik	55 %	25.000.00 0,00	482.000.000 ,00	55	25.000.000 ,00	0 %	0,00	-	0	0	482.000.000,00	-	1.928,0 0	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Kuang	
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	1 03 005	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	persentase capaian akses air limbah domestik yang layak	78 %	25.000.00 0,00	3.475.994.0 00,00	78	25.000.000 ,00	0 %	0,00	-	0	0	3.475.994.000,0 0	-	13.903, 98	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan	1 03 006	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	persentase sistem jaringan drainase yang berfungsi dengan baik	73 %	2.965.508. 576,00	27.155.519. 242,00	73	2.965.508. 576,00	40 %	307.670.0 00,00	54,7 9	10,374949	54,7 945 2	27.463.189.242, 00	75,06	926,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	udara																		(13)
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	1 03 008	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung pemerintah yang berfungsi dengan baik	84 %	2.582.559.999,00	%	67.826.357.328,00	84 %	2.582.559.999,00	40 %	18.813.020.737,00	47,62	728.46403	47,61905	86.639.378.065,00	56,69	3.354,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	1 03 010	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	persentase jembatan dalam kondisi baik	80 %	15.210.800.000,00	%	175.790.615.673,00	80 %	15.210.800.000,00	50 %	88.023.409.285,00	62,50	578,6902	62,50	263.814.024.958,00	78,13	1.734,39	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	1 03 011	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Tenaga Terampil di Kabupaten Paser yang bersertifikat standar nasional	58 %	440.400.000,00	%	132.105.000,00	58 %	440.400.000,00	20 %	204.676.494,00	29,41	46,475135	29,41176	336.781.494,00	43,25	76,47	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	1 03 012	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Penyelenggaraan Tata Ruang	59 %	984.400.000,00	%	823.003.975,00	59 %	984.400.000,00	0 %	407.218.864,00	-	41,367215	0	1.230.222.839,00	-	124,97	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
	Tujuan Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat		47.359.828.580,00		210.858.590.349,00		47.359.828.580,00	42,04			90,10	338,91	221.918.500,980,00			
	Meningkatnya jumlah rumah yang memenuhi persyaratan rumah layak huni	1 04 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase rumah korban bencana dan relokasi yang tertangani	72 %	7.878.745.422,00	0 %	1.734.229.955,00	72 %	7.878.745.422,00	37 %	2.915.286.002,00	51,39	37,001906	51,39	4.649.515.957,00	71,37	59,01	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	1 04 002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase rumah permukiman kumuh yang tertangani	47 %	1.050.400.000,00	0 %	939.509.127,00	47 %	1.050.400.000,00	18,18	150.359.195,00	38,68	14,31447	38,68	1.089.868.322,00	82,30	103,76	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	1 04 003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase luasan permukiman kumuh yang tertangani	30 %	5.875.386.576,00	0 %	3.661.835,027,00	30 %	5.875.386.576,00	18,42	282.292.965,00	61,40	4,8046705	61,40	3.944.127.992,00	204,67	67,13	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	1 04 004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan Ketersedian Rumah Layak Huni	91 %	1.913.200.000,00	0 %	11.621.192.517,00	91 %	1.913.200.000,00	91,3 %	179.869.148,00	100,33	9,4014817	100,33	11.801.061.665,00	110,25	616,82	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
	Meningkatnya cakupan rumah tangga pengguna listrik	1 04 005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	cakupan lingkungan sehat dan aman yang didukung dengan PSU	52 %	30.642.096.582,00	0 %	192.901.823.723,00	52 %	30.642.096.582,00	45,3 %	7.532.103.321,00	87,12	24,5809012	87,12	200.433.927.044,00	167,53	654,11	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			29.938.930.613,00		36.076.346.406,00		29.938.930.613,00	36,84			291,87		51.655.360.192,00			
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	60 %	10.928.282.040,00	0 %	6.199.141.854,00	60 %	10.928.282.040,00	60 %	6.490.595.060,00	100,00	59,3926397	100,00	12.689.736.914,00	166,67	116,12	Satuan Polisi Pamong Praja
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		1 05 002	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda Persentase Demonstrasi Anarkis	55 %	2.987.940.096,00	0 %	1.294.005.250,00	55 %	2.987.940.096,00	39 %	1.749.941.200,00	70,91	58,56681	70,91	3.043.946.450,00	128,93	101,87	Satuan Polisi Pamong Praja
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	7.026.940.664,00	0 %	6.199.141.854,00	72 %	7.026.940.664,00	61 %	3.837.674.781,00	84,72	54,613735		10.036.816.635,00	117,67	142,83	Dinas Pemadam Kebakaran
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara		1 05 004	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan layanan kebakaran kabupaten	40 %	1.603.621.611,00	0 %	15.115.721.506,00	40 %	1.603.621.611,00	30 %	678.303.202,00	75,00	42,298208		15.794.024.708,00	187,50	984,90	Dinas Pemadam Kebakaran

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 9 / 6 x 100%)	(11 = 7 + 9	(12 = 11/6 x 100%	(13)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	(13)
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 05 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	5.680.026.202,00	0 %	6.199.141.854,00	72 %	5.680.026.202,00	26 %	2.153.276.133,00	36,11	37,909616	36,11	8.352.417.987,00	50,15	147,05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	1 05 003	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	cakupan layanan penanggulangan bencana	100 %	1.712.120.000,00	0 %	1.069.194.088,00	100 %	1.712.120.000,00	30,72	669.223.410,00	30,72	39,087413	30,72	1.738.417.498,00	30,72	101,54	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.934.912.166,00		4.531.385.833,00		7.934.912.166,00	40,94		230,65		259,64	8.366.810.650,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1 06 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	6.266.770.554,00	0 %	1.978.776.870,00	72 %	6.266.770.554,00	36 %	3.342.334.416,00	50,00	53,334239	50,00	5.321.111.286,00	69,44	84,91	Dinas Sosial
	Berkurangnya angka kemiskinan	1 06 002	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Cakupan layanan pemberdayaan sosial	100 %	288.423.540,00	0 %	171.336.265,00	100 %	288.423.540,00	25 %	127.039.404,00	25,00	44,046129	25,00	298.375.669,00	25,00	103,45	Dinas Sosial
	Berkurangnya angka kemiskinan	1 06 004	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan layanan rehabilitasi sosial	100 %	404.295.350,00	0 %	349.185.553,00	100 %	404.295.350,00	34,64	109.410.760,00	34,64	27,062087	34,64	458.596.313,00	34,64	113,43	Dinas Sosial
	Berkurangnya angka kemiskinan	1 06 005	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan layanan perlindungan dan jaminan sosial	100 %	545.758.066,00	0 %	1.788.566.525,00	100 %	545.758.066,00	50 %	107.227.310,00	50,00	19,647407	50,00	1.895.793.835,00	50,00	347,37	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 06 006	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Cakupan layanan penanganan bencana	100 %	334.065.420,00	0 %	196.136.820,00	100 %	334.065.420,00	50 %	93.387.670,00	50,00	27,954905	50,00	289.524.490,00	50,00	86,67	Dinas Sosial
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	1 06 007	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	TMP dalam kondisi baik	100 %	95.599.236,00	0 %	47.383.800,00	100 %	95.599.236,00	50 %	56.025.257,00	50,00	58,604294	50,00	103.409.057,00	50,00	108,17	Dinas Sosial
		2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN			965.121.974.975,00		86.248.961.800,00		365.751.658.318,00			7.3000141		0	7.500014066		7,50	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahunn Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12 = 11/6 x 100%	(13)	
			PELAYANAN DASAR																
		2 7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			6.979.061. 724,00		8.242.495.5 10,00		6.979.061. 724,00	43,7 1			1.753,69	343, 15	15.797.349.097, 00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 07 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	6.055.130. 783,00	0 %	3.878.514.3 38,00	72 %	6.055.130. 783,00	103, 9	3.890.342. 947,00	144, 25	64,248702	144, 25	7.768.857.285,0 0	200,3 5	128,30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menurunnya Tingkat Pengaruh Terbuka (TPT)	2 07 002	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Capaian program tenaga kerja yang dapat dilaksanakan setiap tahunnya	100 %	16.660.30 0,00	0 %	7.229.000,0 0	100 %	16.660.300 ,00	50 %	0,00 0	50,0 0	0	50,0 0	7.229.000,00	50,00	43,39	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menurunnya Tingkat Pengaruh Terbuka (TPT)	2 07 003	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	60 %	504.930.9 41,00	0 %	768.286.656 ,00	60 %	504.930.94 1,00	30 %	238.391.6 95,00	50,0 0	47,212733	50,0 0	1.006.678.351,0 0	83,33	199,37	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Menurunnya Tingkat Pengaruh Terbuka (TPT)	2 07 004	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan	30 %	193.339.7 00,00	0 %	156.478.944 ,00	30 %	193.339.70 0,00	14,6 7	75.779.19 3,00	48,9 0	39,194844	48,9 0	232.258.137,00	163,0 0	120,13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2 07 005	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Tingkat penyelesaian perselisihan tenaga kerja	40 %	209.000.0 00,00	0 %	3.431.986.5 72,00	40 %	209.000.00 0,00	20 %	3.350.339. 752,00	50,0 0	1603,0334	50,0 0	6.782.326.324,0 0	125,0 0	3.245,1 3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEMEMPULAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			9.556.756. 550,00		2.098.113.2 95,00		9.556.756. 550,00	176, 94			395,33	104 2,42	7.133.203.447,0 0			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 08 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	8.186.208. 726,00	0 %	1.116.788.1 51,00	72 %	8.186.208. 726,00	82 %	4.473.091. 474,00	113, 89	54,641796	113, 89	5.589.879.625,0 0	158,1 8	68,28	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 002	PROGRAM PENGARUSUTAMAA	Persentase Perangkat Daerah yang	71 %	659.928.1 74,00	0 %	376.354.974 ,00	71 %	659.928.17 4,00	20 %	217.391.6 08,00	28,1	32,941707	28,1 7	593.746.582,00	39,67	89,97	Dinas Pengendalian

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Berkurangnya angka kemiskinan		N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	melaksanakan PPRG Persentase partisipasi perempuan	40	%	0	%	40	%	82	%	7	205,00	205,00	512,50			Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 003	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan	100	%	0	%	67.715.100,00	100	125	46.253.300,00	125,00	35,606851	125,00	113.968.400,00	125,00	87,74	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 004	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pembinaan dan penguatan	60	%	0	%	46.640.100,00	60	66	36.342.500,00	110,00	46,592973	110,00	82.982.600,00	183,33	106,39	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 005	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki sistem data gender atau data anak	60	%	0	%	0,00	60	64,62	4.090.000,00	107,70	20,187871	107,70	4.090.000,00	179,50	20,19	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 006	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	650	653 Poin	0	Poin	26.530.000,00	650	577,4	29.910.000,00	88,83	27,183495	88,83	56.440.000,00	13,67	51,30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 007	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus	100	%	0	%	218.777.485,00	100	50	79.044.185,00	50,00	60,247092	50,00	297.821.670,00	50,00	227,00	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 08 006	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Nilai Evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	650	653 Poin	0	Poin	26.530.000,00	650	577,4	29.910.000,00	88,83	27,183495	88,83	56.440.000,00	13,67	51,30	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya	2 08 007	PROGRAM PERLINDUNGAN	Cakupan layanan anak yang	100	25	0	%	218.777.485	100	125	119.057,0	125,	90,744729	125,	337.834.570,00	125,0		Dinas Pengendalian

Penyusunan RKPD Kabupaten Berau Tahun 2025

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RP/JMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RP/JMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
	angka kemiskinan		KHUSUS ANAK	memerlukan perlindungan khusus	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			8.794.017. 764,00		2.284.406.8 24,00		8.794.017. 764,00		32,1 6		200,17		5.688.984.767,0 0			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 09 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	74 %		0 %	1.532.624.7 20,00	72 %	6.148.333. 782,00	36 %	2.974.594. 243,00	48,6 5	48,380494	48,6 5	4.507.218.963,0 0	65,74	73,31	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan keajahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2 09 002	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	100 %	160.000.0 00,00	0 %	157.384.700 ,00	50 %	160.000.00 0,00	27,5 %	32.738.00 0,00	50,0 0	20,46125	50,0 0	190.122.700,00	90,91	118,83	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan keajahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2 09 003	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat ketersediaan pangan	98 %	1.905.683. 982,00	0 %	340.682.031 ,00	97,9 %	1.905.683. 982,00	48,4 %	179.320.0 00,00	49,3 9	9,4097448	49,3 9	520.002.031,00	50,40	118,83	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan keajahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	2 09 004	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penyaluran cadangan pangan	10 %	495.000.0 00,00	0 %	193.745.188 ,00	10 %	495.000.00 0,00	5,84 %	137.990.7 00,00	58,4 0	27,876909	58,4 0	331.735.888,00	56,15	67,02	Dinas Ketahanan Pangan
	Meningkatnya	2 09 005	PROGRAM	Persentase tingkat	84 %	85.000.00 0	0 %	59.970.185, 00	82 %	85.000.000 0,00	42 %	79.935.00	94,041176		50,0	139.905.185,00			Dinas

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1			Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)			(10 = 9 / 6 x 100%)			11 = 7 + 9			12 = 11/6 x 100%			(13)
	produktivitas usaha dan keesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan		PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	keamanan pangan segar yang diuji	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	Ketahanan Pangan
						0,00		00		,00		0,00		0,00		50,00		0		59,52	164,59		
		2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			907.650.000,00		3.320.838.292,00		907.650.000,00	23,69			598,75		179,40		6.096.096.332,00					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	2 10 004	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	57 %	249.650.000,00	0 %	149.214.500,00	57 %	249.650.000,00	54,76	94.356.800,00		37,795634	96,07	243.571.300,00	168,54	97,57				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	2 10 005	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	56 %	497.000.000,00	%	3.098.742.192,00	56 %	497.000.000,00	0	2.661.581.240,00		535,52942	0,00	5.760.323.432,00	1.159,02	-				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	2 10 007	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Persentase proses penetapan tanah/ ulayat	60 %	85.000.000,00	0 %	34.471.600,00	60 %	85.000.000,00	30	0,00		0	50,00	34.471.600,00	83,33	40,55				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, Penataan Ruang dan Penanggulangan Bencana	2 10 010	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah yang dilaksanakan	30 %	76.000.000,00	0 %	38.410.000,00	30 %	76.000.000,00	10	19.320.000,00		25,421053	33,33	57.730.000,00	111,11	75,96				Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
		2 11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG			27.969.967.409,00		14.463.723.962,00		27.969.967.409,00	20,31			385,78		420,71		30.722.288.736,00					

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026			Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)			Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)			Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1			Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			(7)			(8)			(9)			(10 = 9 / 6 x 100%)			11 = 7 + 9			12 = 11/6 x 100%			(13)
					K	RP		K	RP		K	RP		K	RP		K	RP		K	RP		K	RP		
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 11 001		LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan perencanaan dan evaluasi terlaksana	100 %			0 %			100 %			50 %			50,0 0			50,0 0			50,00			Dinas Lingkungan Hidup
				Persentase dukungan administrasi penunjang urusan pemerintah terlaksana	100 %	13.681.82 3.491,00		0 %	4.144.348,9 42,00		100 %	13.681.823 .491,00		50 %	7.534.572. 059,00		50,0 0			50,0 0			50,00			
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %			0 %			72 %			25 %			34,7 2			34,7 2			48,23			
				Persentase dokumen perencanaan, kajian lingkungan hidup dan evaluasi lingkungan hidup yang dimanfaatkan	70 %	406.661.0 00,00		0 %	416.789.400 ,00		70 %	406.661.00 0,00		10 %	183.033.2 00,00		14,2 9			14,2 9			20,41			
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 002		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase cakupan pemulihan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	9 %			0 %			9 %			1 %			11,1 1			11,1 1			123,4 6			Dinas Lingkungan Hidup
				persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	73 %	1.466.973. 400,00		0 %	757.132.240 ,00		73 %	1.466.973. 400,00		20 %	385.454.1 00,00		27,4 0			27,4 0			37,53			
				Persentase cakupan pencegahan dan penanggulangan pengendalian Pencemaran dan kerusakan lingkungan	73 %			0 %			73 %			20 %			27,4 0			27,4 0			37,53			
				Rasio Luas RTH (Ruang terbuka Hijau) dan Taman kehati yang dikelola	60 %	1.828.685. 477,00		0 %	3.428.612.3 30,00		60 %	1.828.685. 477,00		10 %	929.332.3 00,00		16,6 7			16,6 7			27,78			
Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 004		PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																							Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Kinerja RKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja dengan RKPD Tahun Lain (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		(13)
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 005	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	persentase jumlah perusahaan/pelaku usaha yang memiliki ijin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3	80	144.917.0 50,00		120.941.400 ,00	80	144.917.05 0,00		31.951.40 0,00	15		18,7 5	22,048061		18,7 5	152.892.800,00	23,44	105,50	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	persentase perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan terhadap ijin lingkungan	100	147.792.7 60,00		33.680.000, 00	100	147.792.76 0,00		28.092.10 0,00	15		15,0 0	19,007765		15,0 0	61.772.100,00	15,00	41,80	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 007	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	persentase MHA yang terfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan	100	29.804.25 0,00		14.840.000, 00	100	29.804.250 ,00		0,00	50		50,0 0	0		50,0 0	14.840.000,00	50,00	49,79	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 008	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	persentase kelompok masyarakat, ormas, LSM dan lembaga yang mendapatkan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	55	150.958.8 60,00		47.540.000, 00	55	150.958.86 0,00		55.874.22 5,00	25		45,4 5	37,012882		45,4 5	103.414.225,00	82,64	68,50	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 009	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan pengelolaan kualitas lingkungan hidup	1	60.000.00 0,00		23.490.000, 00	1	60.000.000 ,00		9.760.000, 00	0		-	16,266667		0,00	33.250.000,00	-	55,42	Dinas Lingkungan Hidup
	Menurunnya	2 11 010	PROGRAM	Persentase Pengaduan	100	107.230.0 0		50.545.000, 00	100	107.230.00 00		46.472.00	20		20,0	43,338618		20,0	97.017.000,00			Dinas

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)	
	tingkat pencemaran tanah, air dan udara		PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	lingkungan hidup yang ditangani	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	Lingkungan Hidup	
	Menurunnya tingkat pencemaran tanah, air dan udara	2 11 011	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	persentase pengelolaan sampah disumber persentase sampah yang terangkut ke TPA	19 % 53 %	9.945.121.121,00	0 % 0 %	5.425.804.650,00	19 % 53 %	9.945.121.121,00	4 % 10 %	7.054.023.390,00	21,05 18,87	70,929487	21,05 18,87	12.479.828.040,00	110,80 35,60	90,48		Dinas Lingkungan Hidup
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			7.825.474.489,00		4.396.917.151,00		7.825.474.489,00	47		205,20		193,75	8.141.275.338,00			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 12 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelaporan	100 %	6.473.310.605,00	0 %	1.858.327.989,00	100 %	6.473.310.605,00	50 %	2.962.930.791,00	50,00	45,771491	50,00	50,00	4.821.258.780,00	50,00		74,48
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 12 002	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	96 %	19.800.971,00	0 %	854.167.780,00	96 %	19.800.971,00	46 %	9.440.000,00	47,92	47,67443	47,92	863.607.780,00	49,91	43,6144	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 12 003	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)	96 %	271.800.971,00	0 %	133.150.320,00	96 %	271.800.971,00	46 %	142.400,00	47,92	52,391277	47,92	275.550.320,00	49,91	101,38		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 12 004	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase data kependudukan yang valid	96 %	1.060.561.942,00	0 %	1.551.271.062,00	96 %	1.060.561.942,00	46 %	629.587.396,00	47,92	59,363567	47,92	2.180.858.458,00	49,91	205,63	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2 13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			12.616.752.198,00		6.351.575.042,00		12.616.752.198,00	43,29		196,26		404,84	12.049.487.418,00				

No	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Kode	Capaian Kinerja RP/JMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RP/JMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
(1)	(2)	(4)	(3)	(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9)		(12 = 11/6 x 100%)		(13)		
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP					
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan pu blik berkualitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2 13 001	72	%	6.238.546.966,00	0	%	1.930.115.924,00	72	%	6.238.546.966,00	44	%	3.051.248.934,00	61,11	48,909609	61,11	4.981.364.858,00	84,88	79,85	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	PROGRAM PENATAAN DESA	2 13 002	5	%	5.000.000,00	0	%	85.330.814,00	5	%	5.000.000,00	0	%	0,00	-	0	0,00	85.330.814,00	-	1.706,62	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	2 13 003	100	%	38.970.000,00	0	%	16.989.000,00	100	%	38.970.000,00	125	%	26.700.000,00	125,00	68,514242	125,00	43.689.000,00	125,00	112,11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	2 13 004	100	%	3.570.589.354,00	0	%	2.429.800,754,00	100	%	3.570.589.354,00	50	%	1.952.006.942,00	50,00	54,669041	50,00	4.381.807.696,00	50,00	122,72	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2 13 005	60	%	2.763.645.878,00	0	%	1.889.338,550,00	60	%	2.763.645.878,00	43	%	71,67	71,67	24,169395	50,00	2.557.295.050,00	119,44	92,53	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				85	%		0	%		85	%		40	%	47,06	47,06				55,36		
		UPUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2 14			821.030,960,00			3.786.223,469,00			821.030,960,00	85,43		309,87	331,14	4.952.482.891,00					Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2 14 002	10	%	191.200,000,00	0	%	86.915.440,00	10	%	191.200,000,00	3,43	%	143.648,600,00	34,30	75,130021	34,30	230.564.040,00	343,00	120,59	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2 14 003	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB	76 %	452.314.000,00	0 %	2.131.075.090,00	76 %	452.314.000,00	139,2 %	997.310.822,00	183,21	220,49081	183,21	3.128.385.912,00	241,07	691,64	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
	Berkurangnya angka kemiskinan	2 14 004	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga aktif	100 %	177.516.960,00	0 %	1.568.232.939,00	100 %	177.516.960,00	113,6 %	25.300.000,00	113,63	14,252159	113,63	1.593.532.939,00	113,63	897,68	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
		2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			16.281.442.032,00		11.265.938.305,00		16.281.442.032,00	9,43			273,08	51,80	21.075.349.790,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 15 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	12.090.000.1.318,00	0 %	3.591.819.644,00	72 %	12.090.001.318,00	8,05 %	6.354.051.593,00	11,18	52,556252	11,18	9.945.871.237,00	15,53	82,27	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	2 15 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan LLAJ yang sesuai standar	90 %	3.755.440.714,00	0 %	5.902.364.865,00	90 %	3.755.440.714,00	15,88 %	3.136.961.695,00	17,64	83,53112	17,64	9.039.326.560,00	19,60	240,70	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya konektivitas antar wilayah kecamatan	2 15 003	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang-perorang atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kabupaten	90 %	336.000.000,00	0 %	1.744.153.796,00	90 %	336.000.000,00	8,3 %	258.273.849,00	9,22	76,867217	9,22	2.002.427.645,00	10,25	595,96	Dinas Perhubungan
	Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur	2 15 005	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERATAPIAN	persentase pelaksanaan rencana induk perkeretaapian	40 %	100.000.000,00	0 %	27.600.000,00	40 %	100.000.000,00	5,5 %	60.124.348,00	13,75	60,124348	13,75	87.724.348,00	34,38	87,72	Dinas Perhubungan
		2 16	URUSAN PEMERINTAHAN			13.219.078.528,00		11.650.137.288,00		13.219.078.528,00	93,33			123,00	333,33	17.369.365.356,00			

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
			BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 16 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	5.917.098.972,00	0 %	1.796.804.724,00	72 %	5.917.098.972,00	60 %	3.327.057.586,00	83,33	56,227851	83,33	5.123.862.310,00	115,74	86,59	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	2 16 002	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase keluhan masyarakat atas pelayanan Pemda yang tertangani	100 %	3.077.353.185,00	0 %	3.137.656.354,00	100 %	3.077.353.185,00	200 %	1.149.742.062,00	200,00	37,361394	200,00	4.287.398.416,00	200,00	139,32	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	2 16 003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase aplikasi yang terintegrasi	40 %	4.224.626.371,00	0 %	6.715.676.210,00	40 %	4.224.626.371,00	20 %	1.242.428.420,00	50,00	29,409191	50,00	7.958.104.630,00	125,00	188,37	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2 17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			565.000.000,00		4.949.740.430,00		565.000.000,00	9,70			210,66	76,95	5.335.823.432,00			
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	2 17 003	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi sehat	62 %	55.000.000,00	0 %	19.959.000,00	62 %	55.000.000,00	18 %	14.112.350,00	29,03	25,658818	29,03	34.071.350,00	46,83	61,95	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	2 17 005	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah koperasi yang maju	12	0,00		3.546.000,00	12	0,00	2	106.672.802,00	16,67	0	16,67	110.218.802,00	138,89	-	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi	2 17 006	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rata-rata omset per koperasi	257	55.000.000,00	0	15.172.700,00	257	55.000.000,00	28,5	14.935.850,00	11,09	27,156091	11,09	30.108.550,00	4,31	54,74	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	kreatif dan BUMKam																		Menengah
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	2 17 007	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang diberdayakan	5 %	55.000.000,00	0 %	7.663.000,00	5 %	55.000.000,00	0,00 %	60.745.000,00	0,16	110,44545	0,16	68.408.000,00	3,20	124,38	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	2 17 008	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan jumlah UMKM yang naik kelas	0,05 %	400.000,00	0 %	4.903.399,730,00	0,05 %	400.000,00	0,01 %	189.617,000,00	20,00	47,40425	20,00	5.093.016.730,00	40,00	1.273,25	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			9.048.748.426,00		1.607.381,990,00		9.048.748.426,00	79,83			128,84		4.101.160.062,00			
Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		2 18 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	6.672.336.719,00	0 %	1.139.896,792,00	72 %	6.672.336.719,00	38 %	2.060.683.027,00	52,78	30,883978	52,78	3.200.579.819,00	73,30	47,97	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya investasi daerah		2 18 002	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA	725	523.040,000,00	juta rupiah	200.889,838,00	725	523.040,000,00	320	78.351,600,00	44,14	14,98004	44,14	279.241.438,00	6,09	53,39	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Meningkatnya Multiplier Effect Sektor Pertanian		2 18 003	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah investor non tambang dan non sawit	62	236.600,000,00	Investor	28.493,000,00	62	236.600,000,00	27	78.856,000,00	43,55	33,328825	43,55	107.349.000,00	70,24	45,37	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 9 / 6 x 100%)	(11 = 7 + 9	K	RP	(12 = 11/6 x 100%	K	RP	(13)				
	Meningkatnya investasi daerah	2 18 004	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	82 % 20 %	188.417.860,00 0 %	82 % 879.771.850,00	82 % 198.840.445,00	82 % 22,601365	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	82 % 48,78	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya investasi daerah	2 18 005	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor yang diawasi dan dikendalikan	62 % Inve stor	29.274.500,00 0 %	62 % 605.800.000,00	62 % 53.047.000,00	62 % 8,7565203	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	62 % 43,55	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Meningkatnya investasi daerah	2 18 006	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Ketersediaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal	70 % 131.199.857,00	20.410.000,00 0 %	70 % 131.199.857,00	70 % 24.000.000,00	70 % 18,292703	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	70 % 38,57	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		2 19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			6.279.180.524,00														
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 19 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 % 5.993.769.758,00	838.735.496,00 0 %	72 % 5.993.769.758,00	72 % 3.202.918.692,00	72 % 53,437466	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	72 % 97,22	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2 19 002	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase organisasi pemuda yang aktif Persentase kelompok wirausaha muda (%)	16 % 439.712.300,00	257.255.650,00 0 %	16 % 439.712.300,00	16 % 198.591.200,00	16 % 45,163895	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	16 % 62,50	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2 19 003	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pembinaan cabang olahraga Jumlah atlet berprestasi	34 % 3.674.697.476,00	4.945.920.898,00 0 %	34 % 3.674.697.476,00	34 % 2.485.847.757,00	34 % 67,647685	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	34 % 58,82	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
	Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	2 19 004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS	Gugus Pramuka Aktif (%)	100 % 150.000.000,00	237.268.480,00 0 %	100 % 150.000.000,00	100 % 150.000.000,00	100 % 100	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	100 % 50,00	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9)		(12 = 11/6 x 100%)		(13)			
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP				
			KEPRAMUKAAN																			
		2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			304.948.100,00		148.120.127,00		304.948.100,00			50			27,44	50,0	231.785.627,00				
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	2 20 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rasio perangkat daerah yang memiliki data statistik sektoral	100 %	304.948.100,00	0	148.120.127,00	100	304.948.100,00		83.665.500,00	50	%	50,0	27,43598	50,0	231.785.627,00	50,0	76,01		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			87.490.000,00		31.235.796,00		87.490.000,00			26			10,73	52,0	40.625.796,00				
	Meningkatnya cakupan dan kualitas jaringan telekomunikasi dan internet	2 21 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	tingkat keamanan informasi	50 %	87.490.000,00	0	31.235.796,00	50	87.490.000,00		9.390.000,00	26	%	52,0	10,732655	52,0	40.625.796,00	104,0	46,43		Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		2 22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.914.521.880,00		1.666.016.240,00		1.914.521.880,00			3			43,82	83,3	1.398.115.040,00				
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 22 002	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase penyelenggaraan Event Kebudayaan sesuai dengan standar Kebudayaan	70 %	214.846.900,00		297.947.220,00	70	214.846.900,00		0,00	0	%	0,00	0	0,00	297.947.220,00	-	138,68		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 22 003	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Kelompok Seni/ Sanggar Kesenian yang aktif	24 %	984.306.900,00		701.749.200,00	24	984.306.900,00		116.769.800,00	10	%	41,6	11,86315	41,6	818.519.000,00	173,6	83,16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 22 004	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Jumlah Penyelenggaraan Event dan Penulisan Buku yang Berkaitan dengan Sejarah Daerah	5 %	353.152.000,00		393.286.670,00	5	353.152.000,00		16.920.000,00	0	event	0,00	4,7911381	0,00	410.206.670,00	-	116,16		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 22 005	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	70 %	0,00			70	0,00		0,00	0	%	0,00	0	0,00	0,00	-	0		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 22	006	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	12	362.216.080,00	%	273.033.150,00	12	362.216.080,00	5	98.409.000,00	41,67	27,16859	41,67	371.442.150,00	347,22	102,55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2 23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		405.660.326,00		100.749.259,00		405.660.326,00	2			206,73	140,00	609.750.379,00			
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 23	002	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2	399.065.326,00	0	100.749.259,00	2	399.065.326,00	2	503.691.120,00	100,00	126,21771	100,00	604.440.379,00	5.000,00	151,46	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	2 23	003	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	5	6.595.000,00	Naskah		5	6.595.000,00	2	Naskah	40,00	80,515542	40,00	5.310.000,00	800,00	80,52	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		2 24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		324.930.490,00		188.451.390,00		324.930.490,00	68,33			174,01	254,55	377.443.876,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 24	002	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	50	131.751.600,00	0	72.679.590,00	50	131.751.600,00	25	71.941.743,00	50,00	54,604075	50,00	144.621.333,00	100,00	109,77	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	2 24	003	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	55	143.843.330,00	0	115.771.800,00	55	143.843.330,00	30	88.495.000,00	54,55	61,521796	54,55	204.266.800,00	99,17	142,01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	2 24	004	PROGRAM PERIZINAN PENGUNAAN ARSIP	100	49.335.560,00	0		100	49.335.560,00	150	28.555.743,00	150,00	57,88065	150,00	28.555.743,00	150,00	57,88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		815.658.874.725,00		132.966.648.196,00		184.833.276.530,00				4,5394587	0	4.539458734		4,54	
		3 25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		14.418.901.257,00		14.665.745.142,00		14.418.901.257,00	18,28			182,14	292,00	19.850.709.940,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang	3 25	001	PROGRAM PENUNJANG	72	5.618.815.567,00	%	1.813.077.068,00	72	5.618.815.567,00	60	3.410.248.761,00	83,3	60,693374	83,3	5.223.325.829,00	115,7	92,96	Dinas Perikanan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	memiliki pelayanan publik berkualitas		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA										3				4		
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 25 003	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	1	5.009.100.000,00	0	10.342.088.774,00	1	5.009.100.000,00	0,45	253.944.730,00	45,00	5,0696678	45,00	10.596.033.504,00	4.500,00	211,54	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 25 004	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1	2.701.891.000,00	0	2.095.161.450,00	1	2.701.891.000,00	0,56	1.180.410.442,00	56,00	43,688307	56,00	3.275.571.892,00	5.600,00	121,23	Dinas Perikanan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 25 005	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan wilayah PUD yang diawasi dan IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya perikanan	45	45.000.000,00	0	42.141.250,00	45	45.000.000,00	30	18.855.000,00	66,67	41,9	66,67	60.996.250,00	148,15	135,55	Dinas Perikanan
	Meningkatnya Multiplier Effect Sektor Pertanian	3 25 006	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase peningkatan produksi olahan hasil Perikanan	1	1.044.094.690,00	0	373.276.600,00	1	1.044.094.690,00	0,41	321.505.865,00	41,00	30,792788	41,00	694.782.465,00	4.100,00	66,54	Dinas Perikanan
		3 26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.310.033.834,00		5.248.272.451,00		2.310.033.834,00	3,5			333,13	164,29	6.062.983.906,00			
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	3 26 002	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	Persentase destinasi wisata yang baik	21	1.830.838.000,00		4.873.767.380,00	21	1.830.838.000,00	3	351.215.369,00	14,29	19,183312	14,29	5.224.982.749,00	68,03	285,39	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Susaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9 100%)	(13)	
	(UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam		PARIWISATA															
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	3 26 003	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan	20 %	132.848.578,00	%	212.305.000,00	20 %	132.848.578,00	5 %	261.696.399,00	25,00	196,98848	125,00	356,80	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	3 26 004	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah produk ekonomi kreatif yang memperoleh perlindungan Hak Cipta dari HAKI	100 %	218.048.578,00	Produk	84.418.071,00	100 %	218.048.578,00	100 %	125.699.226,00	100,00	57,64735	100,00	96,36	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
	Meningkatnya peran sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan BUMKam	3 26 005	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah pelaku ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya	20 %	128.298.678,00	Komunitas	77.782.000,00	20 %	128.298.678,00	50 %	76.100.461,00	25,00	59,315078	125,00	119,94	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	
		3 27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			95.667.440.497,00		201.785.692.087,00		95.667.440.497,00	37,59			2.123,95	725,32			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	3 27 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	15.941.047.341,00	%	6.875.282.459,00	72 %	15.941.047.341,00	36 %	7.190.985.950,00	50,00	45,109871	50,00	69,44	88,24	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, peternakan, dan perikanan	3 27 002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana tanaman pangan dan hortikultura yg dimanfaatkan	100 %	3.539.120.000,00	%	3.703.317.505,00	100 %	3.539.120.000,00	40 %	1.032.746.103,00	40,00	29,180873	40,00	40,00	133,82	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 27 003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana pertanian yang dimanfaatkan	100 %	54.036.120.000,00	0 %	88.998.275.616,00	100 %	54.036.120.000,00	50 %	246.102.715,00	50,00	0.4554411	50,00	89.244.378.331,00	50,00	165,16	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 27 005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Pertumbuhan produksi tanaman Pangan dan hortikultura	10 %	169.000.000,00	0 %	97.861.630,00	10 %	169.000.000,00	27,5 %	69.419.200,00	275,00	41.07645	275,00	167.280.830,00	2.750,00	98,98	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 27 007	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertumbuhan produksi kelompok yang disuluh	62 %	1.815.000.000,00	0 %	1.441.976.998,00	62 %	1.815.000.000,00	25 %	557.639.02,00	40,32	30.723912	40,32	1.999.616.000,00	65,04	110,17	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	3 27 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	9.830.505.162,00	0 %	6.875.282.459,00	72 %	9.830.505.162,00	30 %	6.736.826.175,00	41,67	68.529807	41,67	13.612.108.634,00	57,87	138,47	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	3 27 002	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase sarana pertanian (perkebuan dan peternakan) yang dimanfaatkan	100 %	8.195.754.024,00	0 %	3.703.317.505,00	100 %	8.195.754.024,00	50 %	323.257.600,00	50,00	3.9442082	50,00	4.026.575.105,00	50,00	49,13	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%	(13)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, dan peternakan dan perikanan	3 27 003	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Presentase prasarana perkebunan dan peternakan yang dimanfaatkan	100 %	1.493.338. 794,00		88.998.275. 616,00	100 %	1.493.338. 794,00	40 %	7.593.973. 314,00	40,0 0	508,52314	40,0 0	96.592.248.930, 00	40,00	6.468,2 1	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, dan peternakan dan perikanan	3 27 004	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase populasi hewan ternak yang sehat	60 %	458.416.3 82,00	0 %	640.790.641 ,00	60 %	458.416.38 2,00	35 %	217.585.6 50,00	58,3 3	47,464632	58,3 3	858.376.291,00	97,22	187,25	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, dan peternakan dan perikanan	3 27 005	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang terlaksana	100 %	77.738.79 4,00	0 %	97.861.630, 00	100 %	77.738.794 ,00	45 %	784.746.5 40,00	45,0 0	1009,4658	45,0 0	882.608.170,00	45,00	1.135,3 5	Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya produktivitas usaha dan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian, perkebunan, dan peternakan dan perikanan	3 27 006	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase rekomendasi perizinan yang diterbitkan	100 %	111.400.0 00,00	0 %	353.450.028 ,00	100 %	111.400.00 0,00	35 %	378.179.6 00,00	35,0 0	339,47899	35,0 0	731.629.628,00	35,00	656,76	Dinas Perkebunan dan Peternakan
		3 28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			30.445.75 5.418,00		4.611.482.5 59,00		30.445.755 .418,00	50	6,97	64,9 4	6.733.627.614,0 0					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	3 28 004	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA	Persentase luasan tahuara yang dikelola dan berfungsi dengan	77 %	30.445.75 5.418,00	0 %	4.611.482.5 59,00	77 %	30.445.755 .418,00	50 %	2.122.145. 055,00	64,9 4	6,9702493	64,9 4	6.733.627.614,0 0	84,33	22,12	Dinas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 9 / 6 x 100%)	K	RP	11 = 7 + 9	K	RP	(12 = 11/6 x 100%)	(13)
	investasi daerah		PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	peningkatan Produk UMKM yang dipasarkan / dipromosikan		0,00		00		,00			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.302.400.000,00		1.359.068.312,00		1.302.400.000,00	10,45		1.302.400.000,00			87,50	1.538.858.212,00					
Meningkatnya investasi daerah		3 31 002	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan produksi industri berbasis pertanian	2,4	1.252.400.000,00	0	1.340.829.652,00	2,4	1.252.400.000,00	0,9		128.707.500,00	37,50	10,276868	37,50	1.469.537.152,00	0	1.562,50	117,34	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
Meningkatnya investasi daerah		3 31 003	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase pemutakhiran data IKM	40	50.000.000,00	0	18.238.660,00	40	50.000.000,00	20		51.082.400,00	50,00	102,1648	50,00	69.321.060,00	0	125,00	138,64	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
		3 32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			389.586.034,00		1.042.844.400,00		389.586.034,00	45					130,00	1.153.471.800,00					
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur		3 32 002	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Cakupan kawasan transmigrasi yg sesuai perencanaan	100	104.200.000,00	0	685.841.300,00	100	104.200.000,00	50		15.520.000,00	50,00	14,894434	50,00	701.361.300,00	0	50,00	673,09	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur		3 32 003	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Peningkatan Jumlah KK transmigran sejahtera yang ditempatkan	70	88.200.000,00	0	51.046.300,00	70	88.200.000,00	35		47.172.400,00	50,00	53,483447	50,00	98.218.700,00	0	71,43	111,36	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
Meningkatnya Kualitas dan Layanan Infrastruktur		3 32 004	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan perkotaan baru yang terbentuk	100	197.186.034,00	0	305.956.800,00	100	197.186.034,00	50	Perse	47.935.000,00	50,00	24,309531	50,00	353.891.800,00	0	50,00	179,47	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			618.967,8 50.855,00		59.531.535. 409,00		237.908.24 7.901,00				10,76964	0	10,76964003		10,77	
			SEKRETARIAT DAERAH			67.412.28 5.801,00		140.329.286 .648,00		67.412.285 .801,00	42,9 8			738,88	972, 23	178.213.148.00 0,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 003	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Pe rs en 100	795.864.3 83,00	Pe rs en 0	1.499.596.6 84,00	Pe rs en 100	795.864.38 3,00	57,8 5	Pe rse n	57,8 5	38,565559	57,8 5	1.806.526.230,0 0	57,85	226,99	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	2 0 Pe rs en 100	1.120.922. 191,00	0 Pe rs en ta se	6.914.384.8 62,00	2 100 Per sen tase	1.120.922. 191,00	0 50	0 Pe rse nt as e	- 50,0 0	40,85467	0,00 50,0 0	7.372.333.920,0 0	- 50,00	657,70	Bagian Tata Pemerintahan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan dan Kesra yang ditindaklanjuti Nilai EKPPD	100 % 3 nil ai	479.958.5 71,00	% nil ai	6.914.384.8 62,00	100 % 3	479.958.57 1,00	50 0	% 0 nil ai	50,0 0 -	81,591153	50,0 0 0,00	7.305.988.594,0 0	50,00 -	1.522,2 1	Bagian Hukum
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	80 %	793.708.7 19,00	%	26.668.340. 116,00	80 %	793.708.71 9,00	0	% %	-	76,701455	0,00	27.277.126.251, 00	-	3.436,6 7	Bagian Organisasi
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat. Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	72 72 nil ai In de ks Ni lai In de ks	23.023.31 7.056,00	23.023.31 7.056,00	26.668.340. 116,00	72 72 Ni lai In de ks Ni lai In de ks	23.023.317 .056,00	60 60	Nil ai In de ks Nil ai In de ks	83,3 3 83,3 3	53,769049	83,3 3 83,3 3	39.047.758.775, 00	115,7 4 115,7 4	169,60	Bagian Umum

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti Nilai LPPD	Pe rs en 100	11.628.70 3.152,00	Ni lai LP P D O	6.914.384.8 62,00	Pe rs en 100	11.628.703 .152,00	Pe rs en 50	6.921.951. 300,00	50,0 0	59,524705	50,0 0	13.836.336.162, 00	50,00	118,98	Bagian Kesejahteraan Rakyat
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai LPPD	3 0		0		3 0		0 0		-		0,00		-		
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 002	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Perumusan Kebijakan pemerintahan dan Kesra yang ditindak lanjuti	Pe rs en 100	260.860.4 29,00	Pe rs en	6.914.384.8 62,00	Pe rs en 100	260.860.42 9,00	Pe rs en 50	91.340.15 0,00	50,0 0	35,01495	50,0 0	7.005.725.012,0 0	50,00	2.685,6 2	Bagian Kerjasama
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 003	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan prioritas Perencanaan dan pembangunan yang dituangkan dalam produk hukum daerah	100 %	258.140.5 0 54,00	0 %	1.499.596.6 84,00	100 %	258.140.55 4,00	68,1 8 %	148.936.6 68,00	68,1 8	57,695959	68,1 8	1.648.533.352,0 0	68,18	638,62	Bagian Perekonomian
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 003	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Pe rs en 100	418.766.7 0 59,00	Pe rs en	1.499.596.6 84,00	Pe rs en 100	418.766.75 9,00	Pe rs en 50	223.299.9 03,00	50,0 0	53,323216	50,0 0	1.722.896.587,0 0	50,00	411,42	Bagian Administrasi Pembangunan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 003	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Kebijakan Perencanaan dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	Pe rs en 100	268.632.8 0 74,00	Pe rs en	1.499.596.6 84,00	Pe rs en 100	268.632.87 4,00	Pe rs en 40,6 4	163.454.5 73,00	40,6 4	60,846824	40,6 4	1.663.051.257,0 0	40,64	619,08	Bagian Sumber Daya Alam
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	Ni lai In de ks 72	1.443.235. 958,00	Ni lai In de ks	26.668.340. 116,00	Nilai Ind eks 72	1.443.235. 958,00		1.842.978. 961,00	97,2 2	127,69769	97,2 2	28.511.319.077, 00	135,0 3	1.975,5 1	Bagian Protokol dan Pimpinan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	Nil ai In 72	26.920.17 5.155,00	Nil ai In	26.668.340. 116,00	Nilai Inde k 72	26.920.175 .155,00		14.347.21 2.667,00	97,2 2	53,295391	97,2 2	41.015.552.783, 00	135,0 3	152,36	Bagian Perencanaan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)	
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
	pelayanan publik berkualitas		PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	72				Nilai Indeks	70	97,2 2		97,2 2	135,0 3						dan Keuangan
				Indek Kepuasan Layanan Sekretariat.	72				nilai Indeks	70	97,2 2		97,2 2	135,0 3						
		4 2	SEKRETARIAT DPRD			49.273.38 0.052,00		24.449.213. 747,00		49.273.580 .052,00	16,8 3		122,21	80,5 2	53.225.961.811. 00					
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan layanan Sekretariat	72	33.423.19 0.548,00	In de ks	14.826.079. 099,00	72	33.423.190 .548,00	In de ks	17.888.65 7.694,00	47,2 2	53,521694	47,2 2	32.714.736.793, 00	65,59	97,88	Sekretariat DPRD	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	4 02 002	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Dokumen KUA PPAS dan Perda APBD yang ditetapkan tepat waktu	6	15.850.38 9.504,00	do k u m en	9.623.134.6 48,00	6	15.850.389 .504,00	do ku me n	10.888.09 0.370,00	-	68,692888	0,00	20.511.225.018, 00	- 33,30	- 129,41	Sekretariat DPRD	
				Rekomendasi pengawasan DPRD yang ditindaklanjuti	100		Pe rs en		100		Pe rse n		33,3 0		33,30					
				Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	100		Pe rs en		100		Pe rse n		-		0,00					
		5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			1.546.339 232.994,0 0		232.604.410 561,00		468.389,68 2.430,00			8,6118833	0	8,611883269		8,61			
		5 1	PERENCANAAN			14.323.76 5.754,00		5.185.490,6 38,00		14.323.765 .754,00	89		119,92	428, 73	11.750.616.431, 00					

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%		(13)
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	9.711.126. 894,00	0 %	3.106.161.7 99,00	72 %	9.711.126. 894,00	151 %	4.969.001. 446,00	209, 72	51,168124	209, 72	8.075.163.245,0 0	291,2 8	83,15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 01 002	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RKPD kedalam APBD Persentase kesesuaian capaian kinerja dan target pembangunan daerah	94 %	2.267.955. 000,00	0 %	837.952.173 ,00	94 %	2.267.955. 000,00	100 %	467.908.7 31,00	106, 38	20,631306	25,5 3	1.305.860.904,0 0	113,1 7	57,58	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 01 003	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	93 %	2.344.683. 860,00	0 %	1.241.376.6 66,00	93 %	2.344.683. 860,00	81 %	1.128.215. 616,00	87,1 0	48,118027	87,1 0	2.369.592.282,0 0	93,65	101,06	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		5 2	KEUANGAN			303.429.3 78.440,00		237.313.109 .669,00		303.429.37 8.440,00	19,0 7		382,56		355.488.567.44 9,00				
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	29.786.18 4.000,00	0 %	14.172.866. 773,00	72 %	29.786.184 .000,00	21,3 7	12.631.40 9.884,00	29,6 8	42,406942	29,6 8	26.804.276.657, 00	41,22	89,99	Badan Keuangan Aset Daerah
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	5 02 002	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase penurunan temuan administratif atas laporan keuangan pemerintah daerah	10 %	258.852.9 57.950,00	0 %	206.468.720 .849,00	10 %	258.852.95 7.950,00	0 %	96.259.91 4.935,00	0,00	37,187103	0,00	302.728.635.78 4,00	-	116,95	Badan Keuangan Aset Daerah
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	5 02 003	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase permasalahan pengelolaan barang milik daerah selesai ditindaklanjuti	55 %	1.377.519. 927,00	0 %	865.623.938 ,00	55 %	1.377.519. 927,00	0 %	2.894.140. 898,00	0,00	210,09793	0,00	3.759.764.836,0 0	-	272,94	Badan Keuangan Aset Daerah
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 02 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	10.710.88 9.823,00		14.172.866. 773,00	72 %	10.710.889 .823,00	70 %	5.189.984. 696,00	97,2 2	48,455215	97,2 2	19.362.851.469, 00	135,0 3	180,78	Badan Pendapatan Daerah

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	5 02 004	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rasio PAD terhadap APBD	8 %	2.701.826.740,00	%	1.633.031.336,00	8	%	2.701.826.740,00	4 %	1.200.007.367,00	50,00	2.833.038.703,00	625,00	104,86	Badan Pendapatan Daerah	
		5 3	KEPEGAWAIAN			12.527.794.622,00		2.289.287.994,00			12.527.794.622,00	64,87		114,29	593,32	9.446.730.131,00			
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70		Ind eks		70			78,3		111,86	111,86	159,80			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 03 001		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	70	6.300.197.359,00	Nila i	980.068.229,00	70	Nila i	6.300.197.359,00	78,3	3.466.727.269,00	111,86	4.446.795.498,00	159,80	70,58		
				Persentase PD dengan nilai IRB Baik	60 %		0 %		60	%		0 %		-	0,00	-			
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %		0 %		72	%		78,3			108,75	108,75	151,04		
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	5 03 002	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase ASN bekerja sesuai kompetensi dan kualifikasi dalam jabatan	75 %		0 %		75	%		60,59			80,79	107,72			Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Persentase pegawai berkinerja baik	100 %	6.227.597.263,00	0 %	1.309.219.765,00	100	%	6.227.597.263,00	94,16	3.690.714.868,00	94,16	4.999.934.633,00	94,16	80,29		
				Persentase kesesuaian jabatan pegawai berdasarkan pendidikan	75 %		0 %		75	%		64,43			85,91	114,54			
		5 4	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.187.463.500,00		400.441.218,00			2.187.463.500,00	56,75		33,25	75,67	1.127.874.763,00			
	Meningkatnya Taraf Pendidikan Masyarakat	5 04 002	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN Manajerial dan Fungsional memiliki sertifikasi	75 %	2.187.463.500,00	0 %	400.441.218,00	75 %	%	2.187.463.500,00	56,75	727.433.545,00	75,67	1.127.874.763,00	100,89	51,56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.609.561.230,00		1.588.947.815,00			1.609.561.230,00	40		33,77	61,54	2.132.418.249,00			
	Terwujudnya	5 05 002	PROGRAM	Persentase	65 %	1.609.561.230,00	0 %	1.588.947.815,00	65 %	%	1.609.561.230,00	40		33,76513	61,5	2.132.418.249,0	94,67	132,48	Badan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	pemanfaatan hasil kelibangan		230,00		15,00		230,00		34,00	4		4	0			Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
		6	UNSUP PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			83.255,51 7.363,00		15.974.061. 077,00		27.346.554 .886,00				9,7934373	0	9,793437279		9,79	
		6 1	INSPEKTORAT DAERAH			16.713,04 3.526,00		15.974.061. 077,00		16.713.043 .526,00	32,5	94,25		94,25	222,78	24.127.637.951,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	6 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	13.381,09 3.526,00	0 %	12.264.260. 462,00	72 %	13.381.093 .526,00	38 %	7.058.027. 105,00	52,78	52,746265	52,78	19.322.287.567,00	73,30	144,40	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	6 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Indeks Penerapan Manajemen Resiko (MRI)	4 %	3.110.950. 000,00	0 %	3.529.470.6 15,00	4 %	3.110.950. 000,00	2 %	1.080.589. 769,00	50,00	34,735041	50,00	4.610.060.384,00	1.250,00	148,19	Inspektorat Kabupaten
	Meningkatnya kinerja tata kelola keuangan dan aset daerah	6 01 003	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase PD yang dievaluasi pelaksanaan RB dengan peringkat minimal B Persentase PD yang dievaluasi SAKIP dengan peringkat minimal BB	75 % 75 %	221.000.0 00,00	0 % 0 %	180.330.000 ,00	75 % 75 %	221.000.00 ,00	45 % 45 %	14.960.00 0,00	60,00 60,00	6,7692308	60,00 60,00	195.290.000,00	80,00 80,00	88,37	Inspektorat Kabupaten
		7	UNSUP KEWILAYAHAN			258.747,7 01.397,00		23.572.704 791,00		79.273.555 .935,00				10,102793	0	10,10279346		10,10	
		7 1	KECAMATAN			53.980,27 5.573,00		339.616.497 .658,00		53.980.275 573,00	51,78	2.774,34		2.774,34	5,254,42	365.757.243,511,00			
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	5.403.019. 494,00	0 %	11.703.481. 882,00	72 %	5.403.019. 494,00	40 %	2.825.479. 265,00	55,56	52,294449	55,56	14.528.961.147,00	77,16	268,90	Kantor Camat Tanah Grogot
	Terwujudnya	7 01 002	PROGRAM	Indeks Kepuasan	72 %	269.144,2	0 %	2.873.585,1	72 %	269.144,28	40 %	144.980,0	55,5	53,867019	55,5	3.018.565.165,0	77,16	1.121,5	Kantor Camat

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas		PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Masyarakat Kecamatan		80,00		65,00		0,00		00,00	6		6	0		4	Tanah Grogot
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	194.440.700,00	0 %	6.396.946.248,00	75 %	194.440.700,00	145 %	58.454.000,00	193,33	30,062636	193,33	6.455.400.248,00	257,78	3.319,98	Kantor Camat Tanah Grogot
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55 %	260.480.000,00	0 %	1.257.909.250,00	55 %	260.480.000,00	60 %	154.518.000,00	109,09	59,320485	109,09	1.412.427.250,00	198,35	542,24	Kantor Camat Tanah Grogot
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani / terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	53.415.000,00		394.298.027,00	100 %	53.415.000,00	100 %	0,00	100,00	0	100,00	394.298.027,00	100,00	738,18	Kantor Camat Tanah Grogot
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	184.814.250,00	0 %	946.484.219,00	100 %	184.814.250,00	50 %	72.420.000,00	50,00	39,18529	50,00	1.018.904.219,00	50,00	551,31	Kantor Camat Tanah Grogot
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	253.359.113,00	0 %	11.703.481.882,00	72 %	253.359.113,00	70 %	161.325.778,00	97,22	63,674748	97,22	11.864.807.660,00	135,03	4.683,00	Kelurahan Tanah Grogot
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	82.809.000,00	0 %	2.873.585.165,00	72 %	82.809.000,00	60 %	48.300.000,00	83,33	58,326993	83,33	2.921.885.165,00	115,74	3.528,46	Kelurahan Tanah Grogot
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	1.011.880.000,00	0 %	6.396.946.248,00	75 %	1.011.880.000,00	60 %	483.993.720,00	80,00	47,831138	80,00	6.880.939.968,00	106,67	680,02	Kelurahan Tanah Grogot
	Terwujudnya tata kelola	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN	Persentase desa yang menyampaikan LKP	100 %	15.000.000,00	0 %	946.484.219,00	100 %	15.000.000,00	100 %	14.989.000,00	100,00	99,926667	100,00	961.473.219,00	100,00	6.409,82	Kelurahan Tanah Grogot

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026	Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%)		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
	pemerintahan kampung yang baik		PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	desa tepat waktu															
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	4.527.468. 117,00	0 %	11.703.481. 882,00	72 %	4.527.468. 117,00	50 %	2.255.862. 792,00	69,4 4	49.826144	96,45	308,33	Kantor Camat Pasir Belengkong		
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	421.569.0 00,00	0 %	2.873.585.1 65,00	72 %	421.569.00 0,00	20 %	201.275.2 00,00	27,7 8	47,744308	38,58	729,38	Kantor Camat Pasir Belengkong		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	121.784.3 70,00	0 %	6.396.946.2 48,00	75 %	121.784.37 0,00	10 %	87.052.60 0,00	13,3 3	71,48093	17,78	5.324,1 6	Kantor Camat Pasir Belengkong		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	293.282.5 00,00	0 %	1.257.909.2 50,00	55 %	293.282.50 0,00	50 %	144.900.0 00,00	90,9 1	49,406289	165,2 9	478,31	Kantor Camat Pasir Belengkong		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	40.773.50 0,00	0 %	394.298.027 ,00	100 %	40.773.500 ,00	25 %	18.095.00 0,00	25,0 0	44,379315	25,00	1.011,4 2	Kantor Camat Pasir Belengkong		
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	60.763.65 0,00	0 %	946.484.219 ,00	100 %	60.763.650 ,00	10 %	8.258.400, 00	10,0 0	13,59102	10,00	1.571,2 4	Kantor Camat Pasir Belengkong		
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	4.937.945. 364,00	0 %	11.703.481. 882,00	72 %	4.937.945. 364,00	72 %	2.330.055, 097,00	100, 00	47,186733	138,8 9	284,20	Kantor Camat Kuario		
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	758.670.8 11,00	0 %	2.873.585.1 65,00	72 %	758.670.81 1,00	25 %	381.566.1 00,00	34,7 2	50,294027	48,23	429,06	Kantor Camat Kuario		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	pelayanan publik berkualitas		DAN PELAYANAN PUBLIK																
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75	% 0,00 0	% 6.396.946.248,00 75	% 0,00 0,00	% 70	% 0,00	93,33	0	93,33	0	93,33	6.396.946.248,00	124,44	-	Kantor Camat Kuaro
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55	% 252.154.320,00	% 1.257.909.250,00 55	% 252.154.320,00	% 50	% 115.945.500,00	90,91	45,981961	90,91	0	90,91	1.373.854.750,00	165,29	544,85	Kantor Camat Kuaro
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan	100	% 0,00 0	% 394.298.027,00 100	% 0,00 0,00	% 0	% 0,00	-	0	-	0	0,00	394.298.027,00	-	-	Kantor Camat Kuaro
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	% 0,00 0	% 946.484.219,00 100	% 0,00 0,00	% 0	% 0,00	-	0	-	0	0,00	946.484.219,00	-	-	Kantor Camat Kuaro
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	% 201.290.410,00	% 11.703.481.882,00 72	% 201.290.410,00	% 72	% 0,00	100,00	0	100,00	0	100,00	11.703.481.882,00	138,89	5.814,23	Kelurahan Kuaro
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	% 13.000.000,00	% 2.873.585.165,00 72	% 13.000.000,00	% 72	% 0,00	100,00	0	100,00	0	100,00	2.873.585.165,00	138,89	22.104,50	Kelurahan Kuaro
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75	% 254.000.000,00	% 6.396.946.248,00 75	% 254.000.000,00	% 70	% 0,00	93,33	0	93,33	0	93,33	6.396.946.248,00	124,44	2.518,48	Kelurahan Kuaro

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%)		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	In de ks 4.898.570. 984,00	In de ks 11.703.481. 882,00	72	Ind eks 4.898.570. 984,00	72	In de ks 2.698.949. 352,00	100, 00	55,096667	100, 00	14.402.431.234, 00	100, 00	138,8 9	294,01	Kantor Camat Long Ikis
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	In de ks 301.710.8 18,00	In de ks 2.873.585.1 65,00	72	Ind eks 301.710.81 8,00	72	In de ks 158.885.0 00,00	100, 00	52,661353	100, 00	3.032.470.165,0 0	100, 00	138,8 9	1.005,0 9	Kantor Camat Long Ikis
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/keompok usaha baru	75	In de ks 165.392.4 50,00	Pe rs en 6.396.946.2 48,00	75	Per sen 165.392.45 0,00	0	Pe rse n 27.003.72 0,00	-	16,327057	0,00	6.423.949.968,0 0	0,00	-	3.884,0 6	Kantor Camat Long Ikis
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55	203.330.0 00,00	0 %	1.257.909.2 50,00	55 %	203.330.00 0,00	40 %	55,759111	72,7 3	113.375.0 00,00	72,7 3	1.371.284.250,0 0	132,2 3	674,41	Kantor Camat Long Ikis
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaik an di wilayah kecamatan	100	35.200.00 0,00	0 %	394.298.027 ,00	100 %	35.200.000 ,00	50 %	3,1960227	50,0 0	1.125.000, 00	50,0 0	395.423.027,00	50,00	1.123,3 6	Kantor Camat Long Ikis
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	78.000.00 0,00	0 %	946.484.219 ,00	100 %	78.000.000 ,00	100 %	42,179487	100, 00	100,0 0	100, 00	979.384.219,00	100,0 0	1.255,6 2	Kantor Camat Long Ikis
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	233.977.6 94,00	0 %	11.703.481. 882,00	72 %	233.977.69 4,00	72 %	45,418299	100, 00	100, 00	11.809.750.571, 00	100, 00	138,8 9	5.047,3 8	Kelurahan Longkis
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75	179.891.6 96,00	0 %	6.396.946.2 48,00	75 %	179.891.69 6,00	70 %	104,61917	93,3 3	93,3 3	6.585.147.448,0 0	93,3 3	124,4 4	3.660,6 2	Kelurahan Longkis

No	Sasaran	Kode	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
							K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas																				
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	4.588.417.414,00	%	11.703.481.882,00	72 %	4.588.417.414,00	72 %	2.723.336.858,00	100,00	59,352422	100,00	14.426.818.740,00	138,89	314,42	Kantor Camat Long Kali
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	559.022.936,00	%	2.873.585.165,00	72 %	559.022.936,00	72 %	294.080.950,00	100,00	52,60624	100,00	3.167.666.115,00	138,89	566,64	Kantor Camat Long Kali
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	217.219.439,00	%	6.396.946.248,00	75 %	217.219.439,00	60 %	75.326.000,00	80,00	34,677375	80,00	6.472.272.248,00	106,67	2.979,60	Kantor Camat Long Kali
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	363.191.106,00	%	1.257.909.250,00	55 %	363.191.106,00	50 %	162.427.000,00	90,91	44,722185	90,91	1.420.336.250,00	165,29	391,07	Kantor Camat Long Kali
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	42.096.600,00	%	394.298.027,00	100 %	42.096.600,00	100 %	0,00	100,00	0	100,00	394.298.027,00	100,00	936,65	Kantor Camat Long Kali
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	226.414.000,00	%	946.484.219,00	100 %	226.414.000,00	100 %	72.860.000,00	100,00	32,179989	100,00	1.019.344.219,00	100,00	450,21	Kantor Camat Long Kali
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 %	609.581.062,00	%	11.703.481.882,00	80 %	609.581.062,00	80 %	263.283.013,00	100,00	43,190812	100,00	11.966.764.895,00	125,00	1.963,11	Kelurahan Longkali
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	333.336.620,00	%	2.873.585.165,00	72 %	333.336.620,00	72 %	145.740.800,00	100,00	43,721809	100,00	3.019.325.965,00	138,89	905,79	Kelurahan Longkali

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100 %	170.630.270,00	%	6.396.946.248,00	100	170.630.270,00	80 %	35.625.000,00	80,00	20,878476	80,00	6.432.571.248,00	80,00	3.769,89	Kelurahan Longkali
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	18.480.000,00	%	946.484.219,00	100	18.480.000,00	100 %	0,00	100,00	0	100,00	946.484.219,00	100,00	5.121,67	Kelurahan Longkali
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	3.930.898.903,00	%	11.703.481.882,00	72	3.930.898.903,00	72 %	1.520.685.587,00	100,00	38,685441	100,00	13.224.167.469,00	138,89	336,42	Kantor Camat Batu Sopang
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	1.506.448.250,00	%	2.873.585.165,00	72	1.506.448.250,00	72 %	173.853.700,00	100,00	11,540635	100,00	3.047.438.865,00	138,89	202,29	Kantor Camat Batu Sopang
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	94.634.750,00	%	6.396.946.248,00	75	94.634.750,00	30 %	41.484.750,00	40,00	43,836698	40,00	6.438.430.998,00	53,33	6.803,45	Kantor Camat Batu Sopang
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketrtiban	55 %	331.684.750,00	%	1.257.909.250,00	55	331.684.750,00	30 %	54.275,950,00	54,55	16,363716	54,55	1.312.185.200,00	99,17	395,61	Kantor Camat Batu Sopang
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	90.721.000,00	%	394.298.027,00	100	90.721.000,00	30 %	20.300.000,00	30,00	22,376297	30,00	414.598.027,00	30,00	457,00	Kantor Camat Batu Sopang
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	88.770.000,00	%	946.484.219,00	100	88.770.000,00	50 %	19.125.001,00	50,00	21,544442	50,00	965.609.220,00	50,00	1.087,77	Kantor Camat Batu Sopang
	Terwujudnya Birokrasi yang	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG	Indeks Kepuasan	72 %	3.343.363.00	%	11.703.481.00	72	3.343.363.00	36 %	1.801.376.50,00	50,00	53,879175	50,00	13.504.858.377,00	69,44	403,93	Kantor Camat

No	Sasaran	Kode		Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realiasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
						K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	memiliki pelayanan publik berkualitas			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelayanan Sekretariat		170,00		882,00		170,00		495,00	0		0	00			Muara Komam
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7	01	002	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	%	0	2.873.585,165,00	72	%	36	337.159,300,00	50,00	50,732566	50,00	3.210.744,465,00	69,44	483,12	Kantor Camat Muara Komam
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7	01	003	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75	%	0	6.396.946,248,00	75	%	38	73.147,800,00	50,67	27,442997	50,67	6.470.094,048,00	67,56	2.427,40	Kantor Camat Muara Komam
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7	01	004	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketriban	55	%	0	1.257.909,250,00	55	%	28	133.759,000,00	50,91	50,531346	50,91	1.391.668,250,00	92,56	525,74	Kantor Camat Muara Komam
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7	01	005	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	%	0	394.298,027,00	100	%	50	7.179,500,00	50,00	17,425971	50,00	401.477,527,00	50,00	974,46	Kantor Camat Muara Komam
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7	01	006	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	%	0	946.484,219,00	100	%	50	17.197,350,00	50,00	49,460666	50,00	963.681,569,00	50,00	2.771,61	Kantor Camat Muara Komam
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7	01	001	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	%	0	11.703,481,882,00	72	%	36	98.534,876,00	50,00	46,33419	50,00	11.802,016,758,00	69,44	5.549,68	Kelurahan Muara Komam
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7	01	002	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	%	0	2.873,585,165,00	72	%	36	13,915,000,00	50,00	40,556689	50,00	2.887,500,165,00	69,44	8.415,91	Kelurahan Muara Komam
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	7	01	003	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75	%	0	6.396,946,248,00	75	%	38	95,693,900,00	50,67	82,428017	50,67	6.492,640,148,00	67,56	5.592,58	Kelurahan Muara Komam

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP			
	kampung yang baik		DAN KELURAHAN																
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	3.394.614,215,00	0	11.703.481,882,00	72	3.394.614,215,00	36	1.797.603,997,00	50,0	52,954589	50,0	13.501.085.879,00	69,44	397,72	Kantor Camat Batu Engau
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	151.850,000,00	0	2.873.585,165,00	72	151.850,000,00	36	82.095,000,00	50,0	54,06322	50,0	2.955.680.165,00	69,44	1.946,45	Kantor Camat Batu Engau
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75	8.881.727,00	0	6.396.946,248,00	75	8.881.727,00	75	3.200.000,00	100,00	36,029029	100,00	6.400.146.248,00	133,33	72.059,70	Kantor Camat Batu Engau
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55	276.658,460,00	0	1.257.909,250,00	55	276.658,460,00	25	139.650,000,00	45,45	50,477401	45,45	1.397.559.250,00	82,64	505,16	Kantor Camat Batu Engau
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100	55.108,796,00	0	394.298.027,00	100	55.108.796,00	50	21.140,000,00	50,0	38,360482	50,0	415.438.027,00	50,00	753,85	Kantor Camat Batu Engau
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100	228.117,055,00	0	946.484.219,00	100	228.117,055,00	50	85.277,500,00	50,0	37,38322	50,0	1.031.761.719,00	50,00	452,29	Kantor Camat Batu Engau
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72	2.395.715,779,00	0	11.703.481,882,00	72	2.395.715,779,00	57,83	1.233.867,921,00	80,32	51,503101	80,32	12.937.349.803,00	111,55	540,02	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72	33.615,000,00	0	2.873.585,165,00	72	33.615.000,00	70	0,00	97,22	0	97,22	2.873.585.165,00	135,03	8.548,52	Kantor Camat Tanjung Harapan

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD n-1 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		12 = 11/6 x 100%		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	berkualitas		PUBLIK																
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	75 %	79.535.00 0,00	0 %	6.396.946.2 48,00	75 %	79.535.000 ,00	40 %	0,00	53,3 3	0	53,3 3	6.396.946.248,0 0	71,11	8.042,9 3	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55 %	290.740.0 00,00	0 %	1.257.909.2 50,00	55 %	290.740.00 0,00	16,8 3	138.000.0 00,00	30,6 0	47,465089	30,6 0	1.395.909.250,0 0	55,64	480,12	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Pemerintahan UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/ terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	26.300.00 0,00	0 %	394.298.027 ,00	100 %	26.300.000 ,00	0 %	0,00	-	0	0,00	394.298.027,00	-	1.499,2 3	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	44.597.00 0,00	0 %	946.484.219 ,00	100 %	44.597.000 ,00	50 %	10.795.00 0,00	50,0 0	24,205664	50,0 0	957.279.219,00	50,00	2.146,5 1	Kantor Camat Tanjung Harapan
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	2.390.946. 102,00	0 %	11.703.481. 882,00	72 %	2.390.946. 102,00	30 %	1.409.021. 094,00	41,6 7	58,931529	41,6 7	13.112.502.976, 00	57,87	548,42	Kantor Camat Muara Samu
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	7 01 002	PROGRAM PENYELENGGARAAN Pemerintahan DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	72 %	249.137.8 80,00	0 %	2.873.585.1 65,00	72 %	249.137.88 0,00	30 %	71.911.20 0,00	41,6 7	28,864017	41,6 7	2.945.496.365,0 0	57,87	1.182,2 8	Kantor Camat Muara Samu
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 003	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat pertumbuhan usaha/ kelompok usaha baru Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	25 % 75 %	101.910.1 99,00	0 % 0 %	6.396.946.2 48,00	25 % 75 %	101.910.19 9,00	8 % 60 %	14.414.45 3,00	32,0 0 80,0 0	14,144269	32,0 0 80,0 0	6.411.360.701,0 0	128,0 0 106,6 7	6.291,1 9	Kantor Camat Muara Samu
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang	7 01 004	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase penurunan kasus gangguan keamanan dan ketertiban	55 %	245.186.3 87,00	0 %	1.257.909.2 50,00	55 %	245.186.38 7,00	22 %	68.120.00 0,00	40,0 0	27,782945	40,0 0	1.326.029.250,0 0	72,73	540,82	Kantor Camat Muara Samu

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)		(9)		(10 = 9 / 6 x 100%)		(11 = 7 + 9		(12 = 11/6 x 100%)		(13)
					K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	
	baik		UMUM																
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan di wilayah kecamatan	100 %	35.184.000,00	0 %	394.298.027,00	100 %	35.184.000,00	40 %	1.890.000,00	40,00	5,3717599	40,00	396.188.027,00	40,00	1.126,05	Kantor Camat Muara Samu
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan kampung yang baik	7 01 006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyampaikan LKP desa tepat waktu	100 %	115.264.162,00	0 %	946.484.219,00	100 %	115.264.162,00	55,55	49.213.445,00	55,55	42.696224	55,55	995.697.664,00	55,55	863,84	Kantor Camat Muara Samu
		8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			56.735,954.461,00		2.788.637,680,00		28.808.668429,00				8,057058	0	8.057057967		8,06	
		8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			13.902,148.980,00		2.788.637,680,00		13.902.148980,00	85,33			329,08	0,00	7.359.906.419,00	672,71	526,40	
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	8 01 001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	72 %	5.698.872.826,00	%	1.716.806,266,00	72 %	5.698.872.826,00	72 %	2.883.827.526,00	100,00	50,603472	100,00	4.600.633.792,00	138,89	80,73	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	8 01 002	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penurunan konflik berbau sara	100 %	130.227.000,00	%	81.759.550,00	100 %	130.227.000,00	100 %	241.799.729,00	100,00	185,67557	100,00	323.559.279,00	100,00	248,46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	8 01 003	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu	80 %	5.646.562.574,00	%	74.562.308,00	80 %	5.646.562.574,00	70 %	831.745.084,00	87,50	14,730114	87,50	906.307.392,00	109,38	16,05	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Meningkatnya Lingkungan Daerah Yang	8 1 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	persentase organisasi masyarakat (ormas) yang aktif	75 %	202.487,250,00	%	35.756.200,00	75 %	202.487,250,00	70 %	62.930,150,00	93,33	31,078574	93,33	98.686.350,00	124,44	48,74	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan (output)	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja RKPD sampai dengan RKPD Tahun Lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran RKPD Tahun Berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD s/d tahun 2026 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran RPJMD s/d Tahun n-1 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	12 = 11/6 x 100%		(13)
	Konduif		ORGANISASI KEMASYARAKATAN																
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	8 01 005	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kebijakan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang ditindaklanjuti	100 %	719.999.930,00	%	372.074.180,00	100 %	719.999.930,00	100 %	143.132.661,00	100,00	19,879538	100,00	100,00	100,00	71,56	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	8 01 006	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase kasus konflik sosial yang tertangani/terselesaikan	100 %	1.503.999.400,00	%	507.699.176,00	100 %	1.503.999.400,00	100 %	407.813.589,00	100,00	27,115276	100,00	100,00	100,00	60,87	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Rata-rata capaian kinerja (%)						42,67	%												
Rata-rata capaian anggaran (%)						51,12	%												
Predikat kinerja						SR													
Predikat anggaran						R													

Sumber: Bappedalitbang Kab. Paser , 2023

Tabel 2.2

Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Triwulan II Perangkat Daerah terhadap RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD	
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja
			Rp	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	48.267.478.580,00	13.835.168.671,00	28,66	44,38	Sangat Rendah	Sangat Rendah
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	15.933.326.984,00	7.108.596.227,00	44,61	35,33	Sangat Rendah	Sangat Rendah
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	326.154.107.388,00	175.686.776.126,00	53,87	33,17	Sangat Rendah	Sangat Rendah
4	Dinas Kesehatan	273.988.641.515,00	165.644.394.774,00	60,46	48,14	Rendah	Sangat Rendah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	125.150.847.540,00	118.527.755.821,00	94,71	67,43	Sangat Tinggi	Sedang
6	Satuan Polisi Pamong Praja	13.916.222.136,00	8.240.536.260,00	59,22	58,57	Rendah	Rendah
7	Dinas Pemadam Kebakaran	8.630.562.275,00	4.515.977.983,00	52,33	68,42	Rendah	Rendah
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.392.146.202,00	2.822.499.543,00	38,18	26,05	Sangat Rendah	Sangat Rendah
9	Dinas Sosial	8.632.446.526,00	4.163.445.957,00	48,23	43,25	Sangat Rendah	Sangat Rendah
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.368.647.758,00	7.665.480.987,00	104,03	41,20	Sangat Rendah	Sangat Rendah
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	10.331.557.510,00	5.584.661.453,00	54,05	49,49	Rendah	Sangat Rendah
12	Dinas Ketahanan Pangan	8.794.017.764,00	3.404.577.943,00	38,71	35,14	Sangat Rendah	Sangat Rendah
13	Dinas Lingkungan Hidup	58.415.722.827,00	18.380.709.829,00	31,47	46,66	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD				Predikat Tingkat Capaian RKPD	
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan
			Rp	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.825.474.489,00	3.744.358.187,00	47,85	39,78	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.616.752.198,00	5.697.912.376,00	45,16	36,13	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
16	Dinas Perhubungan	17.477.506.822,00	9.809.411.485,00	56,13	36,66	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	13.611.516.628,00	5.812.283.568,00	42,7	47,01	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.318.149.025,00	2.493.778.072,00	34,08	40,34	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	13.568.213.368,00	6.852.069.104,00	50,5	34,92	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.717.819.430,00	4.379.756.038,00	65,2	52,38	Sedang	Rendah	Rendah
21	Dinas Perikanan	14.418.901.257,00	5.184.964.798,00	35,96	43,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
22	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	75.766.418.131,00	9.094.756.370,00	12	45,77	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	22.025.151.019,00	16.979.870.262,00	77,09	46,79	Tinggi	Sangat Rendah	Sangat Rendah
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.203.101.575,00	8.771.872.995,00	41,37	38,78	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
25	Sekretariat DPRD	49.273.580.052,00	28.776.748.064,00	58,4	31,48	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
26	Sekretariat Daerah	67.412.285.801,00	37.883.861.352,00	56,2	39,79	Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
27	Badan Keuangan Aset Daerah	289.716.677.019,00	111.785.465.717,00	38,54	33,15	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah
28	Badan Pendapatan Daerah	13.412.716.563,00	6.389.992.063,00	47,64	41,40	Sangat Rendah	Sangat Rendah	Sangat Rendah

No	Perangkat Daerah	Pagu RKPD	Realisasi RKPD			Predikat Tingkat Capaian RKPD	
			Realisasi Keuangan		Realisasi Kinerja %	Realisasi Keuangan	Realisasi Kinerja
			Rp	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.715.258.122,00	7.884.875.682,00	53,58	41,87	Rendah	Sangat Rendah
30	Inspektorat Kabupaten	16.713.043.526,00	8.153.576.874,00	48,79	39,14	Sangat Rendah	Sangat Rendah
31	Kantor Camat Tanah Grogot	7.728.361.837,00	3.964.459.763,00	51,3	54,27	Rendah	Rendah
32	Kantor Camat Pasir Belengkong	5.465.641.137,00	2.715.443.992,00	49,68	38,60	Sangat Rendah	Sangat Rendah
33	Kantor Camat Kuaro	6.417.060.905,00	2.827.566.697,00	44,06	35,78	Sangat Rendah	Sangat Rendah
34	Kantor Camat Long Ikis	6.096.073.642,00	3.326.707.961,00	54,57	37,00	Rendah	Sangat Rendah
35	Kantor Camat Long Kali	7.128.389.447,00	3.772.679.621,00	52,92	44,70	Rendah	Sangat Rendah
36	Kantor Camat Batu Sopang	6.043.157.653,00	1.829.724.988,27	30,28	38,54	Sangat Rendah	Sangat Rendah
37	Kantor Camat Muara Komam	4.978.229.190,00	2.577.963.221,00	51,78	55,70	Rendah	Rendah
38	Kantor Camat Batu Engau	4.115.230.253,00	2.128.966.497,00	51,73	44,82	Rendah	Sangat Rendah
39	Kantor Camat Tanjung Harapan	2.870.502.779,00	1.382.662.921,00	48,17	34,27	Sangat Rendah	Sangat Rendah
40	Kantor Camat Muara Samu	3.137.628.730,00	1.614.570.192,00	51,46	48,04	Rendah	Rendah
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.902.148.980,00	4.571.248.739,00	32,88	31,65	Sangat Rendah	Sangat Rendah
	Total	1.644.650.714.583,00	845.988.129.173,00	49,72	42,67		

Sumber: Bappedalitbang Kab. Paser, 2023

Berdasarkan Tabel 2.1 dan 2.2 Realisasi RKPD Tahun 2023 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi pelaksanaan RKPD adalah Rp 845.988.129.173,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.644.650.714.583,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Empat Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)
2. Pelaksanaan RKPD berdasarkan program, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 42,67% dan capaian realisasi keuangan sebesar 51,12%, predikat kinerja Rendah ($51\% \leq 65\%$)
3. Pelaksanaan RKPD berdasarkan Perangkat Daerah yang diukur atas pencapaian indikator pada masing-masing sub kegiatan beserta realisasi keuangan dengan capaian kinerja 42,67% dan capaian keuangan sebesar 49,72%, predikat kinerja Sangat Rendah ($\leq 50\%$). Masih sangat rendahnya predikat kinerja pencapaian indicator pada masing-masing sub kegiatan dikarenakan masih terdapat indikator sub kegiatan yang pelaksanaannya diselesaikan pada triwulan III dan triwulan IV.

Tabel 2.3
Konsistensi Program RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2023		Konsistensi Program
		RKPD	APBD	RKPD - APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	9	9	0
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4	4	0
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8	8	0
4	Dinas Kesehatan	5	5	0
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	10	0
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2	2	0
7	Dinas Pemadam Kebakaran	2	2	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	2	0
9	Dinas Sosial	6	6	0

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program Tahun 2023		Konsistensi Program
		RKPD	APBD	RKPD - APBD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8	8	0
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA	10	10	0
12	Dinas Ketahanan Pangan	5	5	0
13	Dinas Lingkungan Hidup	12	12	0
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4	4	0
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5	5	0
16	Dinas Perhubungan	4	4	0
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5	5	0
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	6	0
19	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	8	8	0
20	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	6	0
21	Dinas Perikanan	5	5	0
22	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura	5	5	0
23	Dinas Perkebunan dan Peternakan	6	6	0
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	13	14	1
25	Sekretariat DPRD	2	2	0
26	Sekretariat Daerah	3	3	0
27	Badan Keuangan Aset Daerah	3	3	0
28	Badan Pendapatan Daerah	2	2	0
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	3	0
30	Inspektorat Kabupaten	3	3	0
31	Kantor Camat Tanah Grogot	6	6	0
32	Kantor Camat Pasir Belengkong	6	6	0
33	Kantor Camat Kuaro	4	5	1
34	Kantor Camat Long Ikis	6	6	0
35	Kantor Camat Long Kali	6	6	0
36	Kantor Camat Batu Sopang	6	6	0
37	Kantor Camat Muara Komam	6	6	0
38	Kantor Camat Batu Engau	6	6	0
39	Kantor Camat Tanjung Harapan	6	6	0
40	Kantor Camat Muara Samu	6	6	0
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	6	0
Total		230	232	2

Berdasarkan pada tabel diatas terdapat dua program tambahan dimana pada RKPD 2023 terdapat 230 program yang diampu oleh 41 Perangkat Daerah namun pada APBD terdapat 2 (dua) tambahan program yakni 1 (satu) program pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan 1 (satu) program pada Kecamatan Kuaro. Tambahan program pada pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil tersebut yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian sub kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi, hal itu disebabkan adanya bantuan alokasi DAK dari Kementerian Koperasi terkait peningkatan kapasitas SDM koperasi (Pelatihan) yang baru diluncurkan pada saat tahapan RKPD 2023 telah ditetapkan. Sedangkan tambahan program pada Kecamatan Kuaro yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dimana pada RKPD 2023 anggaran untuk program ini belum terpenuhi. Namun demikian seluruh program tersebut telah tertuang pada RPJMD dan Renstra.

Tabel 2.4

Capaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Paser Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022
1	2	3	4
Tujuan 1: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Pertumbuhan Ekonomi	5,41	1,09
Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	3,5	5,19
Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	0,30	0,22
Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas	Indeks Reformasi Birokrasi	60 (CC)	57,95 (CC)
Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	61	58,41 (CC)
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	70	80,50
Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM daerah	80	83,378
Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka Kriminalitas	52	48

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Target Kinerja 2022	Realisasi Kinerja 2022
1	2	3	4
Tujuan 3: Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	0,275	0,282
Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	6	7
Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	52,73	70
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,43	72,30
	Indeks Risiko Bencana (IRB)	195,5	196,40
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Indeks Pembangunan Manusia	73,04	73,44
Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,25	13,27
	Rata-rata Lama Sekolah	8,79	8,80
Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,88	72,89
Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,25	9,43
	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50	4,88

Indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah untuk itu, pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*Key performance indicator*).

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama pada RKPD Tahun 2022 di atas, diperoleh informasi bahwa:

1. Pertumbuhan Ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 5,41% dengan realisasi 1,09%. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selama 3 (tiga) tahun terakhir disebabkan PDRB Kabupaten Paser sangat tergantung pada Pertambangan dan Penggalian yaitu pertambangan Batu bara. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser tahun 2022 dibandingkan tahun 2021

disebabkan penurunan kapasitas produksi batu bara walaupun harga Batu bara global mengalami kenaikan.

2. Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang (%)

Pertumbuhan sektor ekonomi lokal non tambang perlahan sudah mulai tumbuh jika dibanding capaian tahun 2021 sebesar -1,4%. Pada tahun 2022 pertumbuhan sektor ini tumbuh positif 5,19% diatas target sebesar 3,5%, hal ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi lokal diluar pertambangan dan penggalian seperti memberikan nilai tambah (*value added*) pada bahan baku lokal sudah mulai mendorong perekonomian Kabupaten Paser yang secara perlahan mengurangi ketergantungan pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian Batu bara.

3. Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)

Sub sektor makanan dan minuman adalah kelompok perusahaan yang melakukan kegiatan usaha untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Target pertumbuhan sektor ini adalah 0,30% sementara capaiannya baru 0,22% pada tahun 2022.

4. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Target nilai IRB tahun 2022 sebesar 60 (CC) sementara realisasi sebesar 57,95 (CC). Jika dibandingkan realisasi pada tahun 2021 nilai IRB Kabupaten Paser sebesar 56,05 (CC) telah mengalami kenaikan walaupun belum memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Paser telah berupaya untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai IRB

5. Nilai SAKIP

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendesain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Target nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 61 (B) sementara realisasi 58,40 (CC). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Nilai IPKD Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 80,50 dan melampaui target sebesar 70. Capaian nilai tersebut menunjukkan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Paser dikategorikan Baik.

7. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran IKM penyelenggara layanan publik Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 83,37% melampaui target sebesar 80% yang berarti kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penyelenggara publik adalah sangat baik.

8. Angka Kriminalitas

Kriminalitas atau tindak kejahatan adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Angka kriminalitas di Kabupaten Paser tahun 2022 sebanyak 237 kasus yang terdiri dari 208 kasus kejahatan dan 29 kasus pelanggaran. Realisasi angka kriminalitas tahun 2022 menurun jika dibandingkan angka kriminalitas tahun 2021 yaitu sebanyak 372 kasus, walaupun demikian pencapaian angka kriminalitas ini masih jauh dibawah target tahun 2022 sebanyak 52.

9. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (*disparitas*) pendapatan agregat. Ketimpangan pendapatan merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Ukuran Rasio Gini antara 0 dan 1. Rasio Gini bernilai 0 artinya terjadi pemerataan sempurna, sedangkan rasio Gini bernilai 1 artinya terjadi ketimpangan sempurna.

Capaian Rasio Gini Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 0,282 menurun 0,006 dibanding tahun 2021 sebesar 0,288 yang menunjukkan mulai terjadi pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Paser.

10. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

IKLI merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

11. Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tahun 2022 realisasi Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Paser sebesar 60 melampaui target sebesar 52,73. Hal ini berarti bahwa mulai membaiknya penataan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

12. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Nilai IKLH menjadi acuan terkait kondisi lingkungan di suatu daerah dampak dari pembangunan. Nilai IKLH Kabupaten Paser pada tahun 2022 mencapai 72,30 dengan target sebesar 71,43. Hal ini berarti capaian kinerja Indikator IKLH di Kabupaten Paser Tahun 2022 bernilai Sangat Tinggi yang menyatakan pembangunan di Kabupaten Paser telah berorientasi terhadap aspek keamanan kondisi lingkungan hidup.

13. Indeks Risiko Bencana.

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

14. Indeks Pembangunan Manusia.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi

dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Realisasi capaian IPM tahun 2022 sebesar 73,44% melampaui dari target 73,03, walaupun demikian jika dibandingkan realisasi tahun 2021 sebesar 72,93, maka nilai IPM Kabupaten Paser terus mengalami peningkatan, yang berarti bahwa hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

15. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah penduduk usia 7 tahun ke atas Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 13,27 tahun melampaui target sebesar 13,25 tahun yang berarti bahwa secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,25 tahun atau setara dengan Diploma I.

16. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Paser yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2022 sebesar 8,80 tahun atau hampir menamatkan kelas IX.

17. Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. UHH penduduk Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 72,89 tahun meningkat jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 72,93 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan penduduk pada umumnya dan peningkatan derajat Kesehatan penduduk Kabupaten Paser pada khususnya.

18. Angka Kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 9,43% walaupun belum mencapai target angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 9,25% namun mengalami penurunan jika dibandingkan angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,73%. Hal ini menunjukkan

bahwa program-program dalam pengentasan kemiskinan mulai berjalan dengan baik walaupun demikian masih banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka kemiskinan seperti penerapan program yang tepat sasaran masih terus perlu mendapat perhatian selain tingkat pendidikan yang masih rendah, kualitas kesehatan, penciptaan lapangan kerja dan etos kerja yang tinggi.

19. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pengangguran Terbuka adalah orang yang memiliki kualifikasi cukup, tetapi tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. TPT Kabupaten Paser tahun 2022 sebesar 4,88%, menurun jika dibandingkan TPT tahun 2021 sebesar 5,70%. Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran terbuka mulai membaik seperti upah minimum, angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan tingkat Pendidikan.

2.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan RKPD

Berikut adalah faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser periode Juni 2023:

Tabel 2.5

Faktor Pendorong dan Penghambat Keberhasilan Pelaksanaan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
Misi 1: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing			
Tujuan 1 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing	Sasaran 1.1: Meningkatnya efek berganda (multiplier effect) sektor pertanian	Faktor Pendorong secara internal: 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pembangunan perekonomian pertanian 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor perekonomian pertanian 3. Sudah terbangun mekanisme komunikasi - koordinasi antar SKPD dan pemangku kepentingan untuk mengimplementasikan program pembangunan yang telah direncanakan 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program 5. Kemudahan pelayanan perizinan berusaha. Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Adanya Kesesuaian arah kebijakan pembangunan peekonomian pertanian oleh pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2. Kadaan geografis dan topografi lahan di kalim yang mendukung pengembangan sektor pertanian	Faktor Penghambat sasaran 1.1: 1. Konektivitas sentra produksi pertanian dengan kawasan industri pengolahan belum memadai 2. Kurangnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam mendukung produktivitas pertanian 3. Produksi perikanan hasil tangkapan dan budidaya masih belum optimal 4. Belum berkembangnya nilai tambah produk dan mutu produk hasil perikanan 5. Belum tersedianya peta jalan sarana prasarana pertanian 6. Status dan ketersediaan lahan belum jelas dan tersedia. 7. Belum maksimalnya fungsi pengawasan terhadap keluar masuknya komoditi pertanian dan perikanan.

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
		3. Posisi strategis Kabupaten Paser sebagai penyanggah IKN dalam sektor pemenuhan pangan. 4. Dukungan masyarakat dan swasta dalam mewujudkan kemandirian pangan cukup baik 5. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur dan APBN	
	Sasaran 1.2: Berkembangnya sektor kepariwisataan	Faktor Pendorong secara internal: 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk program kepariwisataan 2. Adanya kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong sektor pertanian 3. Kelembagaan organisasi dan SDM SKPD yang memadai 4. Penetapan 4 daerah tujuan wisata unggulan Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Adanya dukungan kebijakan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memfasilitasi dan mendorong berkembangnya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Paser 2. Dukungan masyarakat dan swasta dalam mengimplementasikan program kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Faktor Penghambat sasaran 1.2: 1. Regulasi roadmap kepariwisataan belum ada 2. Akses menuju destinasi wisata masih kurang baik 3. Kurang optimalnya integrasi atraksi exotic dan unique culture sebagai faktor pendorong pengunjung 4. Rendahnya akses permodalan bagi pelaku UMKM 5. Masih rendahnya kemampuan pelaku UMKM dalam berinovasi dan mengadopsi teknologi digital 6. Rendahnya minat investor di bidang perhotelan

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan			
Tujuan 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Responsif Dan Tangkas	Sasaran 2.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Faktor Pendorong secara internal: 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan APBD untuk penguatan akuntabilitas cukup memadai 2. Kelembagaan organisasi dan SDM SKPD yang proporsional 3. Sumber Daya Manusia ASN yang tersedia di setiap perangkat daerah 4. Komitmen Pimpinan daerah dalam menerapkan sistem dan fungsi pengawasan dan pengendalian perangkat daerah. Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Tersedianya regulasi yang mengatur kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja 2. Adanya peran serta masyarakat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Faktor Penghambat sasaran 2.1: 1. Belum optimalnya implementasi <i>performance based budgeting</i> 2. Sistem pengawasan internal SKPD belum berjalan secara berkala 3. Sistem pengelolaan satu data yang terintegrasi belum optimal

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
	Sasaran 2.2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Faktor Pendorong secara internal: 1. Terbentuknya Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang proporsional 2. Tersedianya alokasi anggaran/ pembiayaan untuk peningkatan pelayanan publik Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Regulasi/kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik sudah disusun untuk mewujudkan komitmen pelayanan publik 2. Semakin tingginya kesadaran/tuntutan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas	Faktor Penghambat sasaran 2.2: 1. Budaya “melayani” pada ASN belum terbangun dengan baik 2. Sistem layanan publik antar unit pelayanan belum terintegrasi 3. Belum optimalnya sistem pemerintahan berbasis elektronik 4. Belum semua wilayah dapat terakses internet dengan baik 5. Sistem merit belum berjalan optimal
	Sasaran 2.3: Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Faktor Pendorong secara internal: 1. Tersedianya struktur kelembagaan secara defenitif 2. Tersedianya SDM yang cukup 3. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga infrastruktur politik Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Hubungan koordinasi yang baik dengan instansi vertikal di daerah dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mengantisipasi dan menangani gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat 2. Tersedianya forum-forum kemasyarakatan yang bermitra dengan Pemerintah daerah	Faktor Penghambat sasaran 2.3: 1. Belum optimalnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 2. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat terhadap budaya luar

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
		3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum	
Misi 3: Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan			
Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Sasaran 3.1: Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Faktor Pendorong secara internal: 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur 2. Tersedianya SDM yang memadai 3. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan infrastruktur 2. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 3. Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan infrastruktur yang berkualitas 4. Adanya dukungan dan kerjasama swasta dalam mengimplementasikan program pembangunan infrastruktur 5. Tersedianya lembaga pemerintah non struktural sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah	Faktor Penghambat sasaran 3.1: 1. Luas wilayah dan kondisi geografi dan topografi yang beragam di Kabupaten Paser membutuhkan biaya yang mahal 2. Alokasi anggaran belum sepenuhnya mampu membiayai pembangunan infrastruktur 3. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masih berorientasi pada <i>business of usual</i> 4. Masih banyak kawasan di Kabupaten Paser yang termasuk dalam kawasan hutan lindung dan cagar alam 5. Terjadinya bencana alam banjir yang merusak infrastruktur yang telah dibangun

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
	Sasaran 3.2: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Faktor Pendorong secara internal: 1. Adanya komitmen kepala daerah dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan 2. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pembangunan infrastruktur 3. Tersedianya regulasi yang mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup 4. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional 5. Tersedianya SDM di perangkat daerah Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan merupakan komitmen global 2. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 3. Adanya dukungan kemitraan stakeholders dalam mengimplementasikan program pembangunan 4. Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat dipegang oleh masyarakat memudahkan penanganan bencana 6. Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendukung penyampaian informasi kebencanaan	Faktor Penghambat sasaran 3.2: 1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian tata ruang 2. Masih lemahnya upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus SDA dan lingkungan hidup 3. Belum adanya Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup 4. Masih kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah (TPA dan pembangunan TPS3R/TPST). 5. Masih lemahnya inovasi usaha yang berprinsip ramah lingkungan 6. Masih terbatasnya kebijakan penanggulangan bencana di daerah (PRB, KRB) 7. Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan 8. Belum optimalnya kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana (destana, katana dll) 9. Peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing			
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata	Sasaran 4.1: Meningkatnya kualitas Pendidikan	Faktor Pendorong secara internal: 4. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program pendidikan 5. Tersedianya SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang memadai 6. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD yang proporsional untuk mengimplementasikan program Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan 2. Dukungan partisipasi masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan kualitas Pendidikan semakin membaik 3. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta	Faktor Penghambat sasaran 6.1: 1. Sarana dan prasarana pendidikan belum sesuai standar 2. Kuantitas tenaga pendidik belum proporsional 3. Kualitas tenaga pendidik belum sesuai standar 4. Sebaran tenaga pendidik belum merata 5. Belum optimalnya pengembangan pendidikan kesetaraan 6. Masih terdapat anak putus sekolah karena alasan faktor lingkungan, keengganan untuk bersekolah 7. Masih lemahnya tata kelola manajemen sekolah
	Sasaran 4.2: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Faktor Pendorong secara internal: 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program kesehatan 2. Tersedianya SDM tenaga kesehatan yang memadai 3. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD	Faktor Penghambat sasaran 6.2: 1. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang baik 2. Luasnya wilayah geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata 3. Sarana dan prasarana kesehatan belum sesuai standar

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
		yang proporsional untuk mengimplementasikan program-program Kesehatan Faktor Pendorong secara eksternal: 1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas kesehatan 2. Dukungan partisipasi masyarakat dan swasta dalam mewujudkan peningkatan kualitas Kesehatan 3. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta	4. Kuantitas tenaga Kesehatan dan non kesehatan belum proporsional 5. Kualitas tenaga kesehatan belum sesuai standar 6. Sebaran tenaga kesehatan belum merata 7. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan 8. Masih lemahnya budaya hidup sehat di masyarakat 9. Alokasi anggaran Kesehatan belum sepenuhnya mampu membiayai pelayanan Kesehatan sesuai standar 10. Munculnya kasus- kasus penyakit 11. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang Kesehatan 12. Munculnya penyakit-penyakit infeksi baru
Sasaran 4.3: Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat		Faktor Pendorong secara internal: 1. Komitmen alokasi anggaran/ pembiayaan bersumber APBD untuk memprioritaskan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Sudah terbangun struktur organisasi SKPD dan lembaga pemerintah non struktural sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat daerah yang untuk mengimplementasikan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat Faktor Pendorong secara eksternal:	Faktor Penghambat sasaran 6.3: 1. Kualitas data perlindungan sosial belum memadai 2. Jumlah dan kualitas SDM kesejahteraan sosial yang masih belum memadai. 3. Masih munculnya ego sektoral instansi yang menyulitkan koordinasi 4. Masih munculnya sikap mental masyarakat yang cenderung kurang produktif 5. Belum tersedianya tenaga kerja sesuai kualifikasi sehingga masih banyak yang

Tujuan (1)	Sasaran (2)	Faktor Pendorong (3)	Faktor Penghambat (4)
		1. Tersedianya regulasi dan kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat 2. Adanya dukungan partisipasi masyarakat dan swasta 3. Dukungan alokasi pembiayaan APBD Provinsi Kalimantan Timur, APBN dan swasta 4. Tersedianya regulasi terkait perlindungan sosial di Kabupaten Paser	belum diterima di pasar kerja 6. Ketersediaan informasi pasar kerja belum optimal 7. Perluasan kesempatan kerja di sektor informal belum berkembang secara optimal. 8. Belum optimalnya peranan UPTD Balai Latihan Kerja dalam mencetak tenaga kerja siap pakai 9. Belum optimalnya peningkatan investasi sebagai penopang peningkatan penyerapan tenaga kerja 10. Belum optimalnya peranan pemuda dan organisasi kepemudaan dibidang pembangunan 11. Tidak semua sarana dan prasarana olahraga terfasilitasi dengan baik

2.3 Rekomendasi

Rekomendasi dari hasil evaluasi bertujuan untuk memperbaiki perencanaan yang akan datang, sehingga output perencanaan akan lebih baik lagi. Rekomendasi ditujukan untuk dokumen perencanaan dan perangkat daerah.

1. Mempercepat Penentuan indikator kinerja program dan kegiatan OPD agar dilaksanakan dengan kriteria dan rumus yang benar serta dilengkapi definisi operasional untuk memudahkan penilaian keberhasilan program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Perangkat Daerah diharapkan membuat rencana aksi Rencana Kerja (Renja) serta laporan perkembangan kegiatan/sub kegiatan secara periodik dan terus menerus.
3. Perangkat Daerah hendaknya menjadikan dokumen perencanaan sebagai dasar dalam pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perkembangan kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator makro. Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertambangan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan total Kabupaten Paser, hal tersebut dikarenakan oleh peranan/kontribusi kategori tersebut merupakan yang terbesar dalam perekonomian kabupaten Paser. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,09 persen lebih rendah dibanding capaian tahun 2021 yang sebesar 5,39 persen.

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas akan berpengaruh terhadap pembangunan suatu daerah.

Dengan memperhatikan perkembangan perekonomian yang telah dicapai, maka pencapaian makro ekonomi tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak dan kebijakan pembangunan yang telah diambil khususnya dalam bidang ekonomi. Bagi daerah indikator ini penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna sebagai bahan untuk menentukan kebijaksanaan dan arah pembangunan dimasa yang akan datang. Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ketahun tergambar melalui penyajian PDRB atas dasar harga konstan secara berkala, karena PDRB ADHK tidak dipengaruhi faktor harga (inflasi/deflasi). Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

Berdasarkan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami kontraksi dari 5,39 pada tahun 2021 menjadi 1,09 pada tahun 2022. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,49 setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan negative sebesar -1,69. Pertumbuhan ekonomi Provinsi

Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 4,48 terjadi pertumbuhan positif dari tahun sebelumnya. Pada lima tahun terakhir Kabupaten Paser memperoleh capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 disusul oleh Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selengkapnya dapat dilihat melalui grafik 3.2 berikut.

Grafik 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

3.1.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum disajikan dalam dua dasar hitung yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan tujuan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk melihat pergeseran dari struktur ekonomi. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut :

A. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Hingga tahun 2022, struktur perekonomian Kabupaten Paser masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Nilai kontribusi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 76,37% dari total PDRB kabupaten Paser. Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori lapangan usaha industri pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda

motor. Kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentuk PDRB Kabupaten Paser adalah sebesar 10,05%, kategori industri pengolahan sebesar 4,17% dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,12%.

Gambaran lebih jelas terkait kontribusi masing-masing kategori, dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini:

Tabel 3.1
Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser
Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,20	10,56	12,68	11,86	10,05
B	Pertambangan dan Penggalan	74,40	72,63	67,55	71,07	76,37
C	Industri Pengolahan	4,49	4,68	5,86	5,29	4,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
F	Konstruksi	2,38	2,87	3,17	2,57	2,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,56	3,87	4,44	3,74	3,12
H	Transportasi dan Pergudangan	0,44	0,47	0,53	0,45	0,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,30	0,33	0,28	0,22
J	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,66	0,79	0,68	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,39	0,44	0,37	0,30
L	Real Estate	0,29	0,30	0,34	0,28	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,06	1,13	1,23	1,05	0,83
P	Jasa Pendidikan	1,21	1,35	1,62	1,44	1,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,46	0,65	0,60	0,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,22	0,23	0,26	0,21	0,17
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2023
Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2011*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 878,75	6 231, 56	6 390,88	6 611,30	7 258,33
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	73,68	81,40	81,11	84,99	90,01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 431,55	1 592,22	1 614,89	1 683,95	1 822,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9 673,09	9 702,38	8 445,65	9 598,40	10 340, 33
Perubahan Inventori	99,33	45,30	34,35	14,11	13,96
Net Ekspor Barang dan Jasa	30 897,72	30 373,04	26 676,62	35 895,20	56 676,65
Produk Domestik Bruto	48 054,12	48 025,89	43 234,51	53 887,95	76 201,78

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023
Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

B. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan tentang capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal pertumbuhannya. Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan ADHK hasil perhitungan angka sangat sementara mencapai angka 1,09%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai pertumbuhan ini mulai mengalami penurunan sebesar 4,3%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori/lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,06% dimana pada tahun 2021 sebesar -3,86%. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2018-2022 (Persen)

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,04	3,35	-1,04	-3,91	4,73
B	Pertambangan dan Penggalian	3,78	3,61	-3,72	7,96	-0,34
C	Industri Pengolahan	5,18	4,49	-2,77	-4,00	5,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,12	1,82	7,85	3,36	5,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	6,85	2,31	6,46	7,76
F	Konstruksi	8,94	14,91	-5,02	-3,86	7,06

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,16	4,96	1,17	3,11	6,82
H	Transportasi dan Pergudangan	5,55	3,99	-0,09	3,00	2,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	4,19	-2,28	3,11	5,35
J	Informasi dan Komunikasi	3,95	6,43	9,08	6,86	5,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,75	3,67	1,89	2,68	10,01
L	Real Estate	3,74	1,78	1,12	-0,96	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	3,77	1,37	-3,67	8,28	4,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,81	4,18	-3,47	2,07	3,07
P	Jasa Pendidikan	7,29	5,97	3,91	2,99	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	5,93	22,84	13,10	4,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,45	4,94	-2,12	1,16	6,09
PDRB		3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
PDRB Tanpa Pertambangan Dan Penggalian		3,46	5,05	-0,55	-1,35	5,19
Kategori Pertambangan Dan Penggalian		3,78	3,61	-3,72	7,96	-0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023
Catatan : *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

Kinerja ekonomi Kabupaten Paser tahun 2022 dari sisi lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi 10,01%, kategori Konstruksi juga mengalami pertumbuhan positif menjadi 7,06%, Perdagangan Besar dan Eceran menjadi 6,82 dimana tahun 2021 sebesar 3,11%.

Perekonomian Kabupaten Paser yang diukur menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar Harga Berlaku menurut jenis pengeluaran sebesar RP.36.980,15 miliar pada tahun 2022, sebagaimana tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser (miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 941,81	4 067,39	4 032,41	4 073,56	4 222,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	49,25	51,86	51,14	51,50	52,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	832,61	920,70	895,95	925,34	974,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 018,84	6 569,97	5 626,97	6 216,04	6 400,22
Perubahan Inventori	72,02	32,95	25,06	8,91	8,58

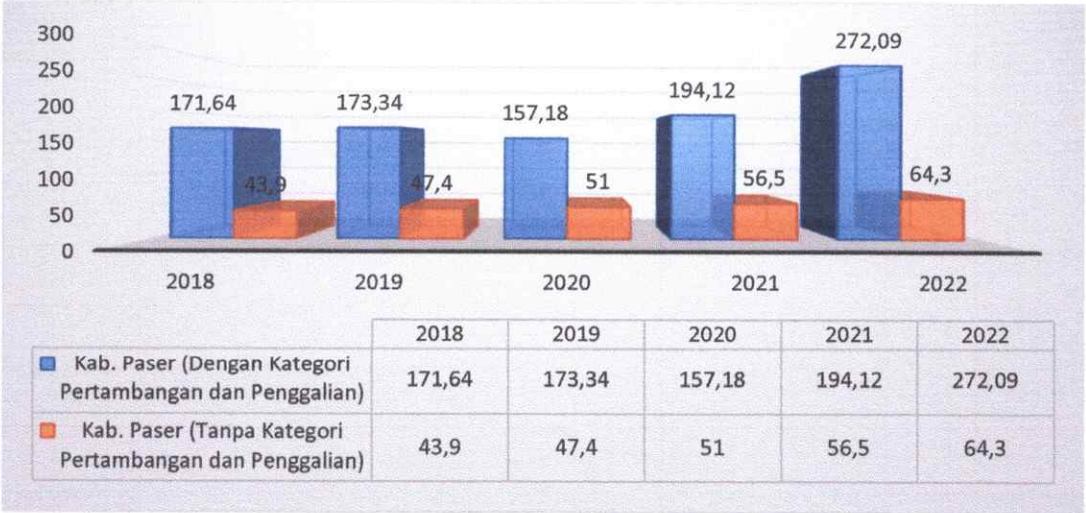
Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Net Ekspor Barang dan Jasa	22 447,53	24 091,87	24 080,53	25 305,98	25 321,18
Produk Domestik Bruto	34 362,05	35 734,75	34 711,82	36 588,97	36 980,15

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023
Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

C. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Paser dengan Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 157,18 juta rupiah serta meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 194,12 juta rupiah dan 272,09 juta rupiah pada tahun 2022. Sejalan dengan PDRB Kabupaten Paser tanpa pertambangan dan penggalian pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari 56,5 juta rupiah menjadi 64,3 juta rupiah dimana peningkatan ini dipengaruhi oleh harga batu bara yang cenderung meningkat pada tahun 2022

Grafik 3.2
PDRB Perkapita Kabupaten Paser



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian tidak dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan dan penggalian. Dengan semakin meningkatnya angka PDRB perkapita menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Paser untuk menghasilkan suatu nilai tambah ekonomi sangat besar.

3.1.1.3 Inflasi

Sampai dengan tahun 2022 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Pada Desember 2022 tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 5,51%. Tingkat inflasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 2,28%. Inflasi terbesar terdapat pada kelompok pengeluaran transportasi yaitu sebesar 13,34%.

Tabel 3.5					
Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser Tahun 2018-2022					
Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Inflasi (Menggunakan data Inflasi Kota Balikpapan)	3.13	1,88	0,65	2,28	5,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

3.1.1.4 Investasi

Nilai investasi Kabupaten Paser tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan pencapaian sebesar Rp.3.182 triliun dimana sebelumnya sebesar Rp.1.022 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp.1.616 triliun dan penanaman Modal Asing sebesar Rp.1.565 triliun. Adapun sektor usaha yang menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan serta industri makanan.

Tabel 3.6		
Jumlah Nilai Investasi 2018-2022		
Tahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Jumlah Nilai Investasi Asing (PMA)
2018	7.944.240.890.140	89.097.050
2019	1.669.261.900.000	240.913.500.000
2020	432.992.300.000	224.978.600.000
2021	567.121.500.000	455.379.840.000
2022	1.616.947.700.000	1.565.134.180.400

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser, 2023

3.1.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun atas 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak.

Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Paser, IPM Kabupaten Paser tahun 2021 sebesar 72,93 poin, meningkat sebesar 0,89 poin dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan nilai IPM seiring dengan peningkatan yang terjadi pada AHH, AHS dan RLS, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Grafik 3.3
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

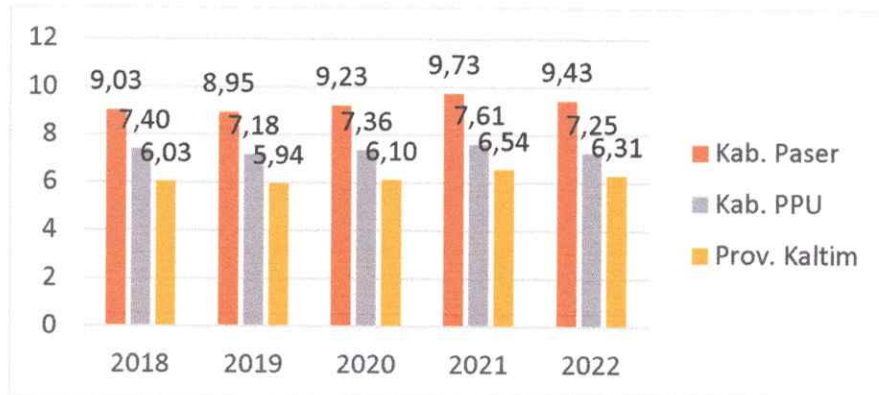
IPM Kabupaten Paser tahun 2022 mencapai 73,44 poin, meningkat sebesar 0,51 poin dibandingkan capaian tahun 2021 (72,93). Demikian juga pertumbuhan IPM provinsi dan nasional yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Paser terjadi pada semua dimensi baik pada AHH, AHS dan RLS, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

3.1.1.6 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser sebesar 27,56 ribu jiwa atau 9,43 persen pada tahun 2022, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,3%.

Grafik 3.4

Penduduk Miskin di Kabupaten Paser (%)

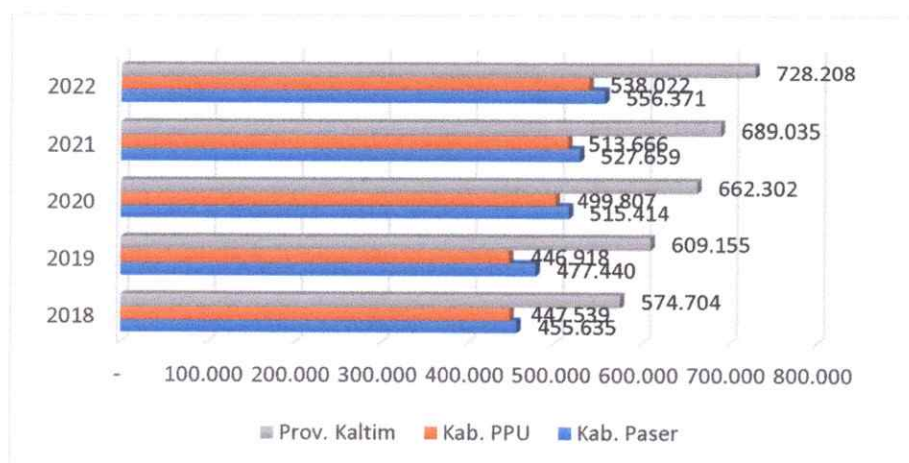


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar Rp.535.547,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan, dan pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Paser sebesar Rp 556.371/kapita/bulan. Angka ini berada diatas Kabupaten Penajam Paser Utara dan penduduk Indonesia, namun dibawah angka provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar Rp.728.208/kapita/bulan.

Grafik 3.5

Garis Kemiskinan Kabupaten Paser



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

3.1.1.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7
Perkembangan Angkatan Kerja, TPAK, TPT dan TKK Kabupaten Paser
Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Angkatan Kerja (Jiwa)	135.854	137.737	142.568	136.640	133.734
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja / TPAK (%)	66,84	66,17	67,88	65,35	61,70
Tingkat Pengangguran Terbuka / TPT (%)	4,84	4,38	4,52	5,70	4,88
Tingkat Kesempatan Kerja / TKK (%)	95	95,45	95,48	96,23	95,12

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Tabel 3.7 tersebut menggambarkan bahwa Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Paser pada tahun 2022 sebesar 4,88%, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,82% jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,70%. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Paser harus terus melakukan upaya untuk mengatasi kenaikan tingkat pengangguran terbuka.

3.1.1.8 Indeks Gini

Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan pendapatan penduduk dalam suatu wilayah adalah “indeks gini” dengan menganalisis nilai dengan interpretasi semakin mendekati nilai 1 maka semakin tidak merata pendapatan penduduk suatu wilayah. Secara umum Indeks Gini Kabupaten Paser memperlihatkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tidak merata. Meskipun para ahli ekonomi menganggap “wajar” pada range indeks gini di kisaran 0,3, namun peningkatan ini perlu menjadi perhatian tersendiri dalam bidang kesejahteraan rakyat agar lebih memprioritaskan program dan kegiatan terkait peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 3.8
Tabel Indeks Gini Kabupaten Paser

No.	Uraian	Capaian Kinerja				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Indeks Gini	0,299	0,262	0,290	0,288	0,282

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

3.1.2 Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2022

Melihat kondisi perkembangan perekonomian terkini, serta berbagai tantangan dan peluang perekonomian daerah, perlu dilakkan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan pada RKPD tahun 2023. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro pada perubahan RKPD tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian	Capaian 2022	Target 2023	
		RKPD	P-RKPD
Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,09	3,5-4,5	1-1,5
Tingkat Kemiskinan	9,43	8,80	8,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,88	4,5	4,5
Indeks Gini	0,282	0,270	0,270
Indeks Pembangunan Manusia	73,44	73,77	73,77

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2023

Catatan: Angka dalam kurung “(x,x)” bernilai kontraksi

Berikut tantangan dan peluang yang mendasari proyeksi perubahan target makro daerah perekonomian Kabupaten Paser tahun 2023 yang menjadi asumsi pada pencapaian target makro ekonomi pada tahun 2023:

- 1) Tantangan
- a. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan daya saing ekonomi

b. Pertumbuhan ekonomi sektor non pertambangan dan penggalian melambat

c. Jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada.
- 2) Peluang
- a. Tersedianya bahan baku sektor pertanian untuk pengembangan industri hilir.

- b. Berkembangnya kelembagaan petani di Kabupaten Paser dalam rangka untuk meningkatkan laju adopsi teknologi di sektor pertanian
- c. Terbukanya akses ekonomi melalui peningkatan infrastruktur jalan membuka membuka akses distribusi produksi.

Secara khusus, perubahan target Laju Pertumbuhan Ekonomi pada P-RKPD tahun 2023 dari 3,5-4,5 pada RKPD 2023 menjadi 1-1,5 disebabkan oleh :

- a. Berdasarkan proyeksi Bank Dunia dalam laporan *Commodity Markets Outlook*, April 2023 memproyeksikan harga batu bara turun sampai tahun 2024. Harga batu bara acuan Desember 2022 sebesar USD 281,48 per ton kemudian pada periode Juni tahun 2023 sebesar USD 191,26 per ton.

Selain Invasi Rusia ke Ukraina telah memperkuat insentif untuk beralih dari bahan bakar fosil, baik melalui peningkatan produksi energi terbarukan maupun pengurangan konsumsi energi, permintaan batu bara global melemah karena pengaruh kebijakan harga karbon (*carbon pricing*) serta melandainya harga gas bumi di sejumlah negara konsumen besar terutama Amerika Serikat dan Eropa.

- b. Dibatasinya produksi batubara untuk PT. Kideco Jaya Agung sebagai anak usaha PT Indika Energy Tbk dari 35,7 juta ton tahun 2021 menjadi 34,7 juta ton tahun 2022 serta 31 juta ton tahun 2023. Hal ini akan berdampak pada kontribusi sector pertambangan dan penggalan dalam struktur ekonomi Kabupaten Paser, dimana sumbangan sector pertambangan dan penggalan pada tahun 2022 sebesar 76,37 persen.

3.2 Perubahan Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah harus dirumuskan secara tepat dan akurat berdasarkan analisis perkembangan ekonomi daerah. Selain itu agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan arah kebijakan keuangan yang tepat, diharapkan kondisi keuangan daerah juga akan semakin kondusif untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan. Kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada Perubahan RKPD tahun 2023 secara umum diarahkan untuk:

- a. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, melalui kebijakan pendapatan tahun 2023 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- b. Kebijakan belanja daerah pada APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2023.
- c. Kebijakan pembiayaan daerah tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah dengan penambahan penyertaan modal pada BPD Kaltim Kaltara.
- d. Pemenuhan mandatory spending Pendidikan.

3.2.1 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah (langsung) pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan dan kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horizontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat dalam posisi yang sama harus diberlakukan sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak/non pajak (retribusi) untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh

dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Paser pada perubahan RKPD tahun 2023 untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan melakukan berbagai kebijakan, antara lain:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana system informasi serta pemungutan pajak dan retribusi daerah
- b. Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak dan retribusi daerah
- c. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- d. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
- e. Peningkatan kerjasama dan inovasi dengan sejumlah stakeholder dalam penyetoran pendapatan daerah.
- f. Perluasan basis Pajak Daerah melalui sinergi Pajak Pusat dan Daerah

Adanya perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan langkah kebijakan keuangan, maka postur proyeksi pendapatan pada Perubahan RKPD tahun 2023 juga mengalami perubahan, pada pendapatan asli daerah diproyeksikan menjadi Rp.310.270.037.093,- pada Perubahan RKPD Tahun 2023, pada pendapatan transfer juga mengalami perubahan menjadi sebesar Rp.3.181.296.589.540,-. Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp.3.501.920.755.033,-. Rencana pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.10
 Realisasi dan Perubahan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD 2023	Perubahan Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	PENDAPATAN					
4.1	Pendapatan Asli Daerah	270.129.905.878,21	196.204.202.093,57	43.268.120.818,72	161.478.006.250,00	310.270.037.093,00
4.1.01	Pajak Daerah	48.074.617.655,25	37.901.037.493,84	15.558.591.999,60	44.142.500.000,00	116.897.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	10.780.217.789,50	11.697.764.162,61	4.643.200.487,68	10.217.838.250,00	10.650.714.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.038.453.633,21	5.723.822.365,84	6.291.746.564,82	5.000.000.000,00	6.291.746.565,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	206.236.616.800,24	140.881.578.071,28	16.774.581.766,62	102.117.668.000,00	176.430.576.028
4.2	Pendapatan Transfer	1.913.090.027.703,00	2.934.495.595.610,00	1.252.339.403.955,00	1.480.214.375.000,00	3.181.296.589.540,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.300.917.444.701,00	2.440.727.796.440,00		1.215.675.363.000,00	2.500.360.433.250,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.139.626.323.072,00	2.322.273.504.848,00	1.035.870.082.280,00	1.097.037.972.000	2.371.365.253.250,00
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak (DBH)	556.793.991.554,00	1.733.834.219.355,00	878.194.051.588,00	720.123.532.000,00	1.738.151.292.000,00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	376.294.804.000,00	375.377.427.294,00	135.951.486.235,00	376.914.440.000,00	392.425.292.000,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	130.807.163.994,00	97.551.276.075,00	0,00	-	240.788.669.250,00
	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	75.730.363.524,00	115.510.582.124,00	21.724.544.457,00	-	-

Kode	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD 2023	Perubahan Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	34.102.035.000,00	3.376.283.000,00	0,00	3.376.283.000,00	10.593.762.000,00
4.2.01.05	Dana Desa (DD)	127.189.086.629,00	115.078.008.592,00	0,00	115.261.108.000,00	118.401.418.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar-Daerah	612.172.583.002,00	493.767.799.170,00	216.469.321.675,00	264.539.012.000,00	680.936.156.290,00
4.2.02.01	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	221.117.067.002,00	306.665.549.170,00	153.221.821.675,00	264.539.012.000,00	437.016.156.290,00
4.2.02.02	- Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	391.055.516.000,00	187.102.250.000,00	63.247.500.000,00	-	243.920.000.000,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	46.223.386.678,00	868.674.791,00	6.354.128.400,00	4.000.000.000,00	10.354.128.400,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.990.000.000,00	597.930.791,00	6.354.128.400,00	4.000.000.000,00	10.354.128.400,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah Pusat	3.990.000.000,00	-		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri		597.930.791,00			6.354.128.400,00
4.3.02	Dana Darurat	-	-		-	-
4.3.03	Lain - Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	42.233.386.678,00	270.744.000,00	0,00	-	-

Kode	Uraian	Jumlah					Perubahan Proyeksi 2023
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD 2023		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	- Pendapatan Hibah Dana BOS	42.233.386.678,00					
	- Pendapatan atas Pengembalian Hibah		270.744.000,00			-	
	Jumlah Pendapatan	2.229.443.320.259,21	3.131.568.472.494,56	1.301.961.653.173,73	1.645.692.381.250,00	3.501.920.755.033,00	

Sumber: *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2022 periode s.d tw 4
 **) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2022 periode s.d tw 4
 ***) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2023 periode s.d tw 2 (sementara)

3.2.2 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Rencana belanja daerah tahun anggaran 2023 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Penurunan/peningkatan rencana pendapatan daerah akan mempengaruhi penyesuaian belanja daerah. Adapun perubahan kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Menitikberatkan pada pemenuhan belanja prioritas dalam rangka kesinambungan implementasi pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026

b. Mendukung implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan

c. Belanja operasi diprioritaskan pada kebutuhan operasional rutin Perangkat Daerah dan kegiatan yang dipandang mendesak serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya seperti alokasi penambahan gaji dan tunjangan ASN/tambahan penghasilan ASN, termasuk alokasi untuk gaji dan tunjangan PPK/tambahan penghasilan PPK serta kebijakan kenaikan pangkat/golongan, kenaikan gaji pokok ASN berdasarkan peraturan berlaku, penambahan gaji pegawai tidak tetap, pembayaran listrik, air dan peralatan dan perlengkapan kantor dan lain-lain, serta pembayaran utang pemerintah daerah yang telah diakui dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.11

Realisasi dan Perubahan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023

Kode (1)	Uraian (2)	Realisasi Tahun 2021* (3)	Realisasi Tahun 2022** (4)	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)*** (5)	RKPD Tahun 2023 (6)	Perubahan Proyeksi Tahun 2023 (7)
5	BELANJA DAERAH					
5.1.	Belanja Operasi	1.677.435.644.149,44	1.813.590.828.363,14	604.389.165.370,00	1.001.230.928.594,00	2.682.709.296.074,00
5.1.1	Belanja Pegawai	668.066.041.455,00	702.289.424.647,00	356.289.978.862,00	647.891.012.412,00	862.775.790.339,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	988.782.289.740,44	1.084.178.477.342,14	247.033.950.589,00	330.739.916.182,00	1.764.415.996.661,00
5.1.3	Belanja Bunga				-	-
5.1.4	Belanja Subsidi				-	-
5.1.5	Belanja Hibah	20.587.312.954,00	24.121.126.374,00	1.065.235.919,00	22.600.000.000,00	55.517.509.074,00
	Pengamanan Pemilukades untuk Kodim dan Polres				-	-
	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	19.270.407.880,00	19.166.780.721,00	-	-	-
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	716.905.074,00	695.000.919,00	-	-	-
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial		3.001.800.000,00	0,00	-	-
	Belanja Bantuan Sosial Kepada		3.001.800.000,00	-	-	-

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD Tahun 2023	Perubahan Proyeksi Tahun 2023
	Anggota Masyarakat					
5.2	Belanja Modal	447.277.558.379,80	437.722.033.925,00	66.740.663.268,00	359.422.500.162,00	1.341.371.002.002,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	8.434.567.029,00	1.962.804.150,00	2.927.097.900,00	6.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	8.434.567.029,00	1.962.804.150,00	2.927.097.900,00	6.000.000.000,00	20.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	230.019.143.779,00	287.378.867.102,00	99.349.325.892,00	277.997.285.827,00	405.449.591.998,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.982.727.150,00	4.455.653.075,00	3.915.039.175,00	5.483.743.150,00	12.759.193.150,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah	2.402.520.000,00	3.615.274.000,00	3.268.042.100,00	4.414.250.000,00	11.687.200.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah	580.207.150,00	840.379.075,00	646.997.075,00	1.069.493.150,00	1.069.493.150,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	227.036.416.629,00	282.923.214.027,00	95.434.286.717,00	272.513.542.677,00	392.690.398.848,00
5.4.02.02	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah			0,00	30.361.037.477,00	33.473.722.448,00
	Kabupaten/Kota					
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah	227.036.416.629,00	282.923.214.027,00	95.434.286.717,00	242.152.505.200,00	359.216.676.400,00
	Provinsi atau Kabupaten/Kota					
	Kepada Desa					
5.4.02.05.1	Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten				125.891.397.200,00	213.057.658.400,00
	kepada Desa (ADD)					
5.4.02.05.2	Belanja Bantuan Keuangan Khusus					146.159.018.000,00

Kode	Uraian	Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD Tahun 2023	Perubahan Proyeksi Tahun 2023
	Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa					
	▪ Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Ke Desa					7.370.000.000,00
	▪ Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa					20.387.600.000,00
	▪ Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kota/Kabupaten kepada Desa (APBN)				115.261.108.000,00	118.401.418.000,00
	▪ Karya Bhakti TNI				1.000.000.000,00	-
TOTAL JUMLAH BELANJA		2.363.166.913.337,24	2.540.654.533.540,14	773.406.252.430,00	1.644.650.714.583,00	4.449.529.890.074,00

Sumber: *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2022 periode s.d tw 4
**) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2022 periode s.d tw 4
***) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2023 periode s.d tw 2 (sementara)

Salah satu kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada Perubahan RKPD tahun 2023 adalah dalam rangka pemenuhan mandatory spending pendidikan. Rencana belanja urusan pendidikan sebagaimana mandatory Undang-undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Berikut disajikan alokasi mandatory spending Pendidikan, Kesehatan, Pengawasan dan Kapasitas SDM ASN.

Tabel 3.12

Proyeksi Mandatory Spending Kabupaten Paser

No	Uraian	Jumlah	Mandatory (%)	Proyeksi Belanja Mandatory Kab. Paser (%)
	Belanja Daerah	4.449.529.890.074		
A	Belanja Fungsi Pendidikan	893.582.408.607	20	20,01
1	Belanja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	784.961.695.456		
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	784.961.695.456		
2	Belanja diluar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjang pelaksanaan fungsi pendidikan	108.620.713.151		
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.420.484.065		
	Belanja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	19.420.484.065		
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	43.833.047.078		
	Belanja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	43.833.047.078		
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.407.032.500		
	Program Pendidikan dan Pelatihan	2.407.032.500		
	Dinas Lingkungan Hidup	141.905.300		
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	141.905.300		
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	17.980.018.490		
	Belanja Sarana Pendidikan	12.037.699.670		
	Pembangunan Gedung Pendidikan dan Pelatihan	5.942.318.820		
	Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	1.649.200.000		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela	1.649.200.000		

No	Uraian	Jumlah	Mandatory (%)	Proyeksi Belanja Mandatory Kab. Paser (%)	
	Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah				
	Dinas PPKBP3A	2.561.630.574			
	Belanja pada Dinas PPKBP3A	2.561.630.574			
	Dinas Sosial	271.452.650			
	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	19.531.250			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	233.997.500			
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	17.923.900			
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.785.180.678			
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	16.660.300			
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.225.354.264			
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	239.711.850			
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	78.100.000			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	6.764.611.816			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.764.611.816			
	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.706.150.000			
	Hibah Sarana Pendidikan dan Pendidikan Keagamaan	4.840.000.000			
	Beasiswa	2.012.450.000			
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1.928.700.000			
	Bagian Umum	100.000.000			
	Asrama Mahasiswa/i	100.000.000			
B	Belanja Fungsi Kesehatan	556.523.920.246	10	12,51	
1	Belanja pada Dinas Kesehatan dan RSUD	544.023.957.593			
	Dinas Kesehatan	258.377.106.432			
	RSUD Panglima Sebaya	223.650.596.476			
	Rumah Sakit Umum Daerah Kerang	3.916.574.512			
	UPTD Puskesmas	51.478.416.223			
	UPTD Perbekalan Obat dan Alkes	986.221.950			
	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	5.615.042.000			

No	Uraian	Jumlah	Mandatory (%)	Proyeksi Belanja Mandatory Kab. Paser (%)	
2	Belanja diluar Dinas Kesehatan/RSUD yang menunjang pelaksanaan fungsi kesehatan:	12.499.962.653			
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.499.962.653			
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	12.499.962.653			
C	Belanja Pengawasan	36.745.048.183	0,75	0,83	
	Inspektorat Daerah	19.294.681.059			
	Belanja pada Inspektorat Daerah	19.294.681.059			
	Belanja diluar Inspektorat Daerah yang menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan:	17.450.367.124			
	Sekretariat DPRD	8.882.120.800			
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	2.601.082.000			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	587.796.200			
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	5.693.242.600			
	Satuan Polisi Pamong Praja	2.721.520.000			
	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	2.721.520.000			
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan	4.978.041.424			
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.978.041.424			
	Bagian Administrasi Pembangunan	868.684.900			
	Program Perekonomian dan Pembangunan	868.684.900			
D	Belanja Peningkatan Kapasitas SDM ASN	23.637.361.007	0,16	0,53	
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.584.421.007			
	Belanja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.584.421.007			
2	Belanja diluar Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menunjang pelaksanaan fungsi kepegawaian	52.940.000			
	Satuan Polisi Pamong Praja	52.940.000			
	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	52.940.000			

3.2.3 Perubahan Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah sebagai satu kesatuan dalam struktur APBD, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan mencakup pemberian dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pada Perubahan RKPD tahun 2023, kebijakan pembiayaan anggaran mengalami perubahan yang semula direncanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.200.000.000.000,- pada Perubahan RKPD 2023 menjadi Rp.966.609.135.041,- untuk pengeluaran pembiayaan pada Perubahan RKPD 2023 sebesar Rp.19.000.000.000,-.

Hasil analisis dan perkiraan perubahan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, perubahan proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Realisasi dan Perubahan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH				Perubahan Proyeksi Tahun 2023
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	528.408.789.165,74	383.195.196.087,10	0,00	200.000.000.000,00	966.609.135.041,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	528.408.789.165,74	383.195.196.087,10	0,00	200.000.000.000,00	966.609.135.041,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.490.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	201.041.666.667,00	19.000.000.000,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.490.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00	11.500.000.000,00	19.000.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)				11.500.000.000,00	19.000.000.000,00
	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kandilo				4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Bank Kaltimara				7.500.000.000,00	15.000.000.000,00
6.2.3	Pengembalian Pinjaman Daerah				189.541.666.667,00	-

No.	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	JUMLAH			
		Realisasi Tahun 2021*	Realisasi Tahun 2022**	Realisasi Tahun 2023 (Per 30 Juni)***	RKPD Tahun 2023
	Pengembalian Pinjaman Daerah pada Bank Kaltimtara				189.541.666.667,00
6.2.4	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO		516.918.789.165,74	375.695.196.087,10	0,00	1.041.666.667,00
					947.609.135.041,00

Sumber: *) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2022 periode s.d tw 4
 **) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2022 periode s.d tw 4
 ***) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Paser Tahun 2023 periode s.d tw 2 (sementara)

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 yaitu **“PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN BERBASIS PERTANIAN UNTUK MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT”**

Tema ini kemudian dijabarkan ke dalam empat (empat) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan Perekonomian Yang Mandiri Berbasis Pertanian
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Pemerintahan Yang Partisipatif.
3. Penguatan Layanan Infrastruktur Dan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial.

Sebagaimana Visi Kabupaten Paser yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026 yaitu **“MENUJU KABUPATEN PASER MAJU, ADIL, DAN SEJAHTERA”**. Untuk merealisasi Visi tersebut, maka di dalam RPJMD telah ditetapkan 4 (empat) Misi pembangunan Kabupaten Paser sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Mandiri dan Berdaya Saing.
2. meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien Melalui Pemerintahan yang Profesional, Partisipatif dan Transparan.
3. Mengurangi Ketimpangan Antarwilayah melalui Peningkatan Aksesibilitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.
4. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Berdasarkan dari misi pembangunan tersebut selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai melalui serangkaian program dan kegiatan.

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Perubahan RKPD Tahun 2023

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang

berkelanjutan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun yang direncanakan.

Perubahan Target Pada Indikator Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Paser tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Uraian	Target 2023	
	RKPD	P-RKPD
Pertumbuhan Ekonomi	3,5-4.5	1-1,5
Tingkat Kemiskinan	8,80	8,80
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5	4,5
Indeks Gini	0,270	0,270
Indeks Pembangunan Manusia	73,77	73,77

Berdasarkan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami kontraksi dari 5,39 pada tahun 2021 menjadi 1,09 pada tahun 2022. Oleh sebab itu dilakukan perubahan target pada P-RKPD Kabupaten Paser menjadi 1-1,5.

Dalam penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023 perumusan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Perubahan RKPD Kabupaten Paser Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2022	TARGET TAHUN 2023	
					RKPD 2023	P-RKPD 2023
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Mandiri dan Berdaya Saing.		Pertumbuhan Ekonomi	1,09	3,5-4,5	1-1,5

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2022	TARGET TAHUN 2023	
					RKPD 2023	P-RKPD 2023
		Sasaran 1.1. Meningkatnya efek berganda (<i>multiplier effect</i>) sektor pertanian	Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang	5,19	5,14	5,41
		Sasaran 1.2. Berkembangnya sektor kepariwisataan	Pertumbuhan sektor I (Penyediaan akomodasi dan makan minum)	0,22	1,12	1,12
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan tangkas		Indeks Reformasi Birokrasi	57,95 (CC)	65 (CC)	65 (CC)
		Sasaran 2.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Nilai SAKIP	58,41 (CC)	65 (B)	60 (B)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80,50	72	81
		Sasaran 2.2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM Daerah	80	81	85
		Sasaran 2.3. Meningkatnya lingkungan Daerah Yang Kondusif	Angka kriminalitas	52	51	47
3	Meningkatkan kualitas layanan infrastruktur penghubung antar wilayah, kualitas pemukiman dan kualitas pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Gini	0,275	0,270	0,270
		Sasaran 3.1. Meningkatnya kualitas dan layanan infrastruktur	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	6	5	7
		Sasaran 3.2. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, penataan ruang dan penanggulangan Bencana	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	70	59,18	59,18
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	72,30	74,56	74,56
			Indeks Risiko Bencana (IRB)	196,40	195	195

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Realisasi 2022	TARGET TAHUN 2023	
					RKPD 2023	P-RKPD 2023
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang merata		Indeks Pembangunan Manusia	73,44	73,77	73,77
		Sasaran 4.1. Meningkatnya kualitas Pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	13,27	13,30	13,30
			Rata-rata Lama Sekolah	8,80	8,70	8,90
		Sasaran 4.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,89	72,90	72,90
		Sasaran 4.3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Angka Kemiskinan	9,43	8,80	8,80
			Tingkat Pengangguran Terbuka	4,88	4,5	4,5

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Perubahan RKPD Tahun 2023 perlu beberapa stategi yang dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi Pertumbuhan Ekonomi tahun 2022 sebesar 1,09 dari target tahun 2022 sebesar 5,41, sementara pada target RKPD 2023 sebesar 3,45-4,5. Dengan memperhatikan kondisi yang ada maka target P-RKPD 2023 Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan hanya tumbuh 1-1,5%. Fluktuatifnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser disebabkan oleh besarnya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian khususnya pertambangan batubara terhadap PDRB. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser kembali menurun sebesar 1,09 dari 5,39 persen tahun 2021. Penurunan ini disebabkan dibatasinya produksi batubara untuk PT. Kideco Jaya Agung sebagai anak usaha PT Indika Energy Tbk dari 35,7 juta ton tahun 2021 menjadi 34,7 juta ton tahun 2022 dan diperkirakan untuk tahun 2023 produksi batubara hanya sebesar 31,0 juta ton.

Pada sisi lain, Indonesia akan mencapai *Net Zero Emission (NZE)* pada 2060 atau lebih cepat, transisi energi menjadi salah satu isu prioritas pada Presidensi G20 Indonesia 2022 dengan fokus utama terhadap akses, teknologi, dan pendanaan. Pemerintah tengah melakukan pengurangan

penggunaan batu bara sebagai sumber energi dengan menggunakan teknologi *Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS)*, pengembangan *Dimethyl ether (DME)*, pengganti elpiji, serta peningkatan nilai tambah mineral melalui hilirisasi di dalam negeri.

2. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 7 telah melampaui target RKPD tahun 2023 sebesar 5, perlu dilakukan penyesuaian target pada P-RKPD tahun 2023 sebesar 7 dengan membuka akses antar kecamatan dan antar desa serta memperbaiki kualitas infrastruktur yang ada melalui peningkatan jalan dan jembatan sehingga memberikan manfaat terhadap alur distribusi antar desa dan antar kecamatan.

3. Rata-rata Lama Sekolah

Realisasi Kinerja 2022 sebesar 8,80 telah melampaui Target RKPD 2023 sebesar 8,70, maka pada target P-RKPD 2023 dilakukan perubahan target menjadi 8,90. Untuk mencapai target tersebut, maka sebagaimana yang telah dilakukan pada tahun 2022 usaha yang dilakukan melalui peningkatan dan pemerataan sarana prasarana pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan formal dan non formal berupa program kejar paket A, B, dan C sehingga setiap masyarakat dapat memperoleh hak yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.

4. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Realisasi kinerja tahun 2022 sebesar 80,50 telah melampaui target RKPD 2023 sebesar 72, maka pada target P-RKPD 2023 dilakukan perubahan target menjadi 81. Langkah yang akan dilakukan berikutnya adalah :

- a) Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran meliputi kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS, dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD
- b) Meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer.
- c) Mendorong peningkatan penyediaan serta mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat.
- d) Meningkatkan upaya-upaya peningkatan penyerapan anggaran di atas 80%

5. Nilai SAKIP

Target Nilai SAKIP pada RKPD 2023 sebesar 65 (B) sementara capaian tahun 2022 sebesar 58,40 (CC) dan target pada P-RKPD 2023 sebesar 60 (B). Perubahan target ini disebabkan beberapa Rekomendasi dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intransipemerintah (AKIP) Tahun 2022 dari Kemenpan RB menunjukkan bahwa masih rendahnya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja perangkat perangkat daerah yang terus menjadi perhatian untuk dapat ditingkatkan.

Beberapa langkah yang akan ditempuh ke depan adalah:

- a) Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sektor
- b) Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja
- c) Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala
- e) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja (SIKIPER)
- f) Penguatan implementasi anggaran berbasis kinerja

6. Nilai IKM Daerah

Capaian IKM daerah tahun 2022 sebesar 83,378 telah melampaui Target RKPD 2023 sebesar 81,00 sehingga untuk target P-RKPD 2023 perlu penyesuaian menjadi 85,00. Selama 3 (tiga) tahun terakhir pengukuran IKM daerah secara kontinyu dilaksanakan melalui Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Paser untuk melaksanakan pengukuran IKM. Hasil dari pengukuran IKM akan disampaikan kepada masing-masing perangkat daerah sebagai bahan rekomendasi untuk perbaikan tahun berikutnya.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan ke depan diantaranya:

- a) Penguatan budaya kerja ASN yang berorientasi pada nilai-nilai dasar BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)
- b) Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan
- c) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik

- d) Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau
- e) Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- f) Mendorong pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan dan Mall Pelayanan Publik (MPP)
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala

7. Angka Kriminalitas

Realisasi tahun 2022 sebesar 48 telah melampaui Target RKPD 2023 sebesar 51, maka pada target P-RKPD 2023 dilakukan perubahan target menjadi 47. Untuk mencapai terget tersebut beberapa langkah yang akan dilakukan adalah:

- a) Penguatan penegakkan Perda
- b) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pendidikan politik dan perilaku demokratis
- c) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
- d) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkoba

8. Pertumbuhan sektor ekonomi lokal/non tambang

Realisasi 2022 sebesar 5,19% telah melampaui Target RKPD 2023 sebesar 5,14%, sehingga perlu penyesuaian target pada P-RKPD 2023 menjadi 5,41%. Dengan mencermati kondisi pasca covid-19 dimana trend pertumbuhan ekonomi lokal/non tambang yang cenderung positif dan sejalan dengan tema RKPD 2023 “Pengembangan Industri Pengolahan berbasis pertanian untuk menggerakkan perekonomian masyarakat” dimana sasaran pembangunan tahun 2023 lebih diarahkan pada sektor pertanian dan industri pengolahan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Paser yang selama ini sektor pertanian dan industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar kedua dan ketiga dalam PDRB Kabupaten Paser selain sektor Pertambangan dan Penggalian. Selain itu dengan dibukanya kembali pembatasan sosial pasca Covid-19 maka pertumbuhan sektor-sektor lain dalam dalam PDRB akan memberikan nilai positif, salah satunya dengan pengembangan sektor pariwisata andalan Kabupaten Paser.

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun dengan mengacu Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan yang telah disusun saat ini tidak seluruhnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Kabupaten Paser. Namun demikian, melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa, merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Paser.

Rencana Belanja Daerah Kabupaten Paser pada Perubahan RKPD Tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp.4.449.529.890.074,- mengalami peningkatan dari RKPD tahun 2023 sebesar Rp.1.644.650.714.583. Pagu perangkat daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1

Pagu Perangkat Daerah Menurut Urusan Pada Perubahan RKPD Tahun 2023

No	Urusan	Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	324.239.585.508	522.720.673.374	777.039.773.678	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	273.988.641.515	363.340.855.413	544.023.957.593	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	125.150.847.540	1.106.891.969.201	1.315.714.479.151	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Urusan	Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	47.359.828.580	138.943.294.592	242.590.609.422	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	13.916.222.136	14.691.670.801	18.230.300.841	Satuan Polisi Pamong Praja
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	8.630.562.275	9.338.446.527	13.860.275.061	Dinas Pemadam Kebakaran
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	7.392.146.202	8.357.066.202	8.932.990.662	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.632.446.526	9.798.030.453	11.205.910.314	Dinas Sosial
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	6.979.061.724	15.711.466.151	18.215.945.759	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	9.510.526.550	10.348.330.550	12.626.266.835	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	8.794.017.764	12.408.635.860	14.984.906.595	Dinas Ketahanan Pangan
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	907.650.000	3.781.179.586	27.238.588.186	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	27.969.967.409	39.235.739.862	52.605.429.501	Dinas Lingkungan Hidup
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.825.474.489	8.636.992.354	12.920.605.949	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	12.616.752.198	14.216.465.502	17.423.963.902	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	821.030.960	5.640.954.960	6.464.267.010	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. PPPA
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	17.477.506.822	23.699.755.004	32.285.687.106	Dinas Perhubungan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13.219.078.528	24.402.924.880	27.584.651.880	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	10.757.087.753	12.277.708.764	14.277.274.477	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	7.318.149.025	9.048.748.426	9.675.002.145	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	11.258.179.534	22.280.004.133	43.833.047.078	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

No	Urusan	Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	304.948.100	323.948.100	489.143.300	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	87.490.000	87.490.000	182.396.000	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.914.521.880	3.621.921.778	7.921.921.778	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	6.392.888.940	18.345.707.840	19.420.484.065	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	324.930.490	343.994.100	1.001.912.490	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	14.418.901.257	21.561.775.883	29.283.323.010	Dinas Perikanan
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	2.310.033.834	8.859.348.401	13.786.619.301	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	75.766.418.131	85.898.483.859	140.771.953.344	Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.025.151.019	118.243.364.554	128.738.830.228	Dinas Perkebunan dan Peternakan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	30.445.755.418	35.152.801.907	37.794.926.055	Dinas Lingkungan Hidup
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	9.143.613.822	9.870.041.206	12.294.000.657	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.302.400.000	3.201.959.900	4.221.959.900	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	389.586.034	389.586.034	489.586.034	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
35	SEKRETARIAT DAERAH	67.412.285.801	91.725.187.386	122.415.622.305	Sekretariat Daerah
36	SEKRETARIAT DPRD	49.273.580.052	53.654.424.870	53.806.663.207	Sekretariat DPRD
37	PERENCANAAN	14.323.765.754	15.785.720.126	19.941.665.474	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
38	KEUANGAN	289.716.677.019	398.252.090.916	457.480.231.860	Badan Keuangan Aset Daerah
39	KEUANGAN	13.412.716.563	14.992.673.044	20.825.643.969	Badan Pendapatan Daerah
40	KEPEGAWAIAN	12.527.794.622	17.660.670.472	23.584.421.007	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
41	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.187.463.500	2.498.698.500	2.407.032.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
42	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.609.561.230	7.186.739.920	6.764.611.816	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
43	INSPEKTORAT DAERAH	16.713.043.526	17.145.843.526	19.294.681.059	Inspektorat Kabupaten
44	KECAMATAN	7.728.361.837	10.883.417.417	13.115.375.604	Kantor Camat Tanah Grogot
45	KECAMATAN	5.465.641.137	5.640.937.337	6.894.745.014	Kantor Camat Pasir Belengkong
46	KECAMATAN	6.417.060.905	6.891.796.084	8.238.635.397	Kantor Camat Kuaro

No	Urusan	Jumlah Pagu			Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2023	APBD 2023	RKPD 2023 Perubahan	
1	2	3	4	5	6
47	KECAMATAN	6.096.073.642	6.606.606.864	8.115.500.863	Kantor Camat Long Ikis
48	KECAMATAN	7.128.389.447	7.862.453.173	9.452.301.994	Kantor Camat Long Kali
49	KECAMATAN	6.043.157.653	6.229.932.793	6.637.544.133	Kantor Camat Batu Sopang
50	KECAMATAN	4.978.229.190	5.779.589.190	6.926.038.437	Kantor Camat Muara Komam
51	KECAMATAN	4.115.230.253	4.396.350.080	5.325.788.229	Kantor Camat Batu Engau
52	KECAMATAN	2.870.502.779	2.939.702.779	3.956.896.382	Kantor Camat Tanjung Harapan
53	KECAMATAN	3.137.628.730	3.465.379.151	4.339.477.449	Kantor Camat Muara Samu
54	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	13.902.148.980	24.949.211.505	31.876.024.068	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		1.644.650.714.583	3.386.218.761.290	4.449.529.890.074	

Pemerintah Daerah Wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2023.

Selanjutnya rincian perubahan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini.

BAB VI

PENUTUP

Penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka penyesuaian terhadap berbagai dinamika kondisi perekonomian dan keuangan daerah guna mencapai target capaian kinerja pembangunan tahun 2023 dan sebagai upaya untuk mengatasi hambatan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 memuat perubahan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta perubahan rencana program dan kegiatan berikut pendanaannya. Dokumen perubahan RKPD ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan sekaligus sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2023. KUPA/PPAS-P Tahun 2023 yang selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2023.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Paser tahun 2023 memerlukan sinergitas, dukungan dan komitmen bersama semua pihak, agar program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Paser.

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA. KAB. PASER,

ANDI AZIS

NIP. 19680816 199803 1 007